

**Undang-Undang Tentang Organisasi Untuk Menetapkan Frekuensi Radio dan
Mengatur Penyiaran dan Layanan Telekomunikasi**

B.E. 2553 (2010)

Raja Bhumibol Adulyadej, REX;

Ditetapkan pada tanggal 17 Desember B.E.2553;

Dalam Rangka Peringatan ke-65 Tahun Pemerintahan.

Yang Mulia Raja Bhumibol Adulyadej adalah sesok pemimpin yang murah hati beliau menyatakan bahwa:

Sudah sepatuhnya untuk mengubah Undang-Undang tentang Organisasi untuk Menetapkan Spektrum frekuensi radio dan Mengatur Penyiaran, Penyiaran Televisi dan Layanan telekomunikasi;

Undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembatasan hak-hak dan kebebasan hak asasi manusia, yang bersangkutan dengan pasal 29 bersama-sama dengan pasal 35, Pasal 36, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 45, Pasal 46 Pasal 47, Pasal 61 dan Pasal 64 Konstitusi Kerajaan Thailand mengizinkan atas ketentuan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum;

Demikian, oleh karena itu, disahkan oleh Raja, menilai dan dengan saran dan persetujuan dari Majelis Nasional, sebagai berikut;

Pasal 1. Undang-undang ini disebut "Undang-Undang tentang Organisasi untuk Menetapkan Frekuensi Radio dan Mengatur Penyiaran dan Layanan Telekomunikasi B.E. 2553 (2010)."

Pasal 2. Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal penerbitan dalam berita Negara.

Pasal 3. Undang-Undang tentang Organisasi untuk Menetapkan Spektrum Radio-frekuensi dan untuk Mengatur Penyiaran, Penyiaran Televisi dan Layanan Telekomunikasi B.E. 2543 (2000) harus dibatalkan.

Pasal 4. Dalam Undang-Undang ini:

"Frekuensi radio" adalah gelombang radio atau gelombang hertz yang merupakan gelombang elektromagnetik dari frekuensi yang lebih rendah dari 3.000.000 megahertz yang disebarkan di ruang tanpa sarana penghantar buatan;

"Telekomunikasi" adalah emisi, pengiriman atau penerimaan dari isyarat, sinyal, tulisan, angka, gambar, suara, kode atau gejala alam apapun dengan frekuensi radio, kawat, optik, sistem elektromagnetik, atau dengan sistem lainnya;

"Komunikasi radio" adalah emisi, pengiriman atau penerimaan dari isyarat, sinyal, tulisan, angka, gambar, suara, kode atau gejala alam apapun dengan gelombang hertz;

"Transmisi suara" adalah komunikasi radio yang memancarkan atau mengeluarkan suara untuk penerimaan langsung oleh masyarakat;

"Transmisi televisi" adalah komunikasi radio yang memancarkan suara dan gambar visual untuk penerimaan langsung oleh masyarakat;

"Layanan Penyiaran Suara " adalah layanan yang menyediakan layanan berita umum atau program untuk penerimaan melalui peralatan, baik dengan cara frekuensi radio, kawat, optik, elektromagnetik, atau sistem lainnya, atau kombinasi keduanya, atau layanan serupa lainnya yang ditentukan oleh NBTC jasa penyiaran suara;

"Layanan Penyiaran Televisi" adalah layanan yang menyediakan layanan berita umum atau program untuk melihat dan mendengarkan melalui peralatan, baik dengan cara frekuensi radio, kawat, optik, elektromagnetik, atau sistem lain, atau kombinasi keduanya, atau lainnya layanan serupa lainnya yang ditentukan oleh NBTC sebagai jasa penyiaran televisi;

"Layanan Komunikasi Radio" adalah layanan untuk penerimaan dan emisi isyarat, sinyal, tulisan, angka, gambar, suara, kode atau gejala alam apapun melalui gelombang hertz yang dimaksudkan untuk urusan telekomunikasi khusus atau tujuan ad-hoc yang bukan merupakan bisnis telekomunikasi di bawah undang-undang bisnis telekomunikasi, atau jasa penyiaran suara atau televisi di bawah undang-undang tentang bisnis penyiaran;

"Layanan telekomunikasi" adalah layanan yang menyediakan emisi, pengiriman atau penerimaan isyarat, sinyal, tulisan, angka, gambar, suara, kode atau pernyataan pikiran apapun dengan cara hertz, kawat, optik, elektromagnetik, atau sistem lainnya, atau kombinasi keduanya, harus mencakup layanan

satelit komunikasi atau bisnis lain yang ditentukan sebagai layanan telekomunikasi oleh NBTC tetapi tidak termasuk penyiaran suara, siaran televisi, dan layanan komunikasi radio;

"Tabel Alokasi Frekuensi" adalah alokasi pita frekuensi penyiaran suara tertentu, siaran televisi, komunikasi radio, jasa telekomunikasi atau tujuan lain di bawah kondisi yang ditentukan oleh NBTC;

"Rencana frekuensi" adalah bagian saluran frekuensi radio untuk penyiaran suara, siaran televisi, komunikasi radio, dan layanan telekomunikasi untuk penggunaan di bawah kondisi yang ditentukan oleh NBTC;

"Penetapan frekuensi" adalah otorisasi yang diberikan untuk stasiun radio, stasiun televisi atau stasiun komunikasi radio untuk menggunakan frekuensi radio atau saluran radio sebagaimana ditentukan dalam Tabel Alokasi Frekuensi atau Rencana Frekuensi Radio untuk penggunaan di bawah kondisi yang ditentukan oleh NBTC;

"Komunitas" adalah sekelompok orang yang tinggal di lokasi umum, baik di daerah perkotaan atau pedesaan, dan harus mencakup sekelompok orang yang terorganisir yang memiliki kesamaan minat di lokasi yang berdekatan secara geografis, atau dihubungkan melalui komunikasi. Kelompok tersebut dikaitkan dengan perpanduan sosial dan budaya, berkolaborasi terus menerus dalam kegiatan yang sah dan moral di bawah manajemen yang tepat dan dengan maksud menyatakan atas nama kelompok.

"Dana" adalah Penyiaran dan Telekomunikasi Penelitian dan Dana Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

"Komisaris" adalah komisaris (s) dari Penyiaran Nasional dan Komisi telekomunikasi;

"Pengawasi resmi" adalah orang yang ditunjuk oleh Broadcasting dan Nasional Komisi telekomunikasi untuk melakukan tugas berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 5. Perdana Menteri harus memiliki biaya dan pengendalian pelaksanaan Undang-Undang ini.

BAB I

Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Nasional

Bagian 1

Komponen, Kualifikasi dan Larangan Komisaris

Pasal 6. Diharuskan adanya Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Nasional yang disingkat "NBTC" singkatnya, yang terdiri dari sebelas komisaris sebagai berikut:

- (1) Seorang pakar di bidang jasa penyiaran suara, dan jasa penyiaran televisi lainnya;
- (2) Dua ahli dalam jasa telekomunikasi;
- (3) Dua ahli hukum, dua ahli ekonomi yang bisa ikut mengatur penyiaran dan layanan telekomunikasi;
- (4) Salah satu pakar dibidang perlindungan konsumen atau hak rakyat dan promosi kebebasan, orang yang bisa ikut mengatur layanan penyiaran, dan ahli lain yang bisa mengatur layanan telekomunikasi;
- (5) Seorang pakar di bidang pendidikan, kebudayaan, atau pengembangan sosial yang bisa mengatur penyiaran dan layanan telekomunikasi.

Sekretaris Jenderal Kantor NBTC harus sekretaris NBTC.

Pasal 7. Komisaris harus memiliki kualifikasi dan tidak akan berada di bawah salah satu larangan sebagai berikut:

A. Kualifikasi Umum

- (1) Warga Negara Thai berdasarkan kelahiran;
- (2) Usia tidak kurang dari tiga puluh lima tahun, dan tidak lebih dari tujuh puluh tahun;

B. Larangan

- (1) Tidak memegang jabatan politik;
- (2) Tidak memegang jabatan dalam suatu partai politik;
- (3) Tidak sebagai orang yang tidak waras dan kurang mental;
- (4) Tidak sedang dalam kecanduan obat-obatan terlarang;

- (5) Tidak sedang dalam keadaan bangkrut atau bangkrut dengan alasan korupsi;
- (6) Tidak dalam masa hukuman oleh pengadilan penjara dan ditahan oleh surat perintah dari Pengadilan;
- (7) Tidak dalam masa hukuman oleh pengadilan kecuali untuk pelanggaran yang dilakukan karena kelalaian, pelanggaran kecil atau pencemaran nama baik;
- (8) Tidak dalam keadaan dikeluarkan, dipecat dan diberhentikan dari pekerjaan resmi, lembaga negara atau perusahaan negara atau lembaga swasta dengan alasan kinerja tidak jujur tugas atau perilaku kotor atau dianggap telah melakukan perbuatan tidak jujur atau penjahat dalam pekerjaan resmi;
- (9) Tidak sedang diperintahkan oleh suatu putusan atau perintah dari Pengadilan tentang kekayaannya di negara bagian dengan alasan kekayaan yang tidak wajar atau peningkatan kekayaan yang tidak wajar;
- (10) Bukan seorang Hakim Mahkamah Konstitusi, Komisaris Pemilihan, Ombudsman, anggota Komisi Nasional Anti-korupsi, anggota Komisi Pemeriksa Keuangan atau anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- (11) Tidak sedang dikeluarkan sebagai anggota dewan pertimbangan;
- (12) Tidak sedang atau pernah menjabat sebagai anggota Dewan Direksi, pejabat eksekutif, penasihat, karyawan, pemegang saham atau mitra dalam sebuah perusahaan atau kemitraan atau orang hukum lainnya yang melaksanakan penyiaran atau bisnis telekomunikasi untuk jangka waktu satu tahun sebelum dinominasikan dalam Pasal 10 atau sebelum mengadakan dipilih berdasarkan Pasal 15;
- (13) Tidak berada di bawah larangan untuk memegang jabatan politik.

Pasal 8. Komisaris Seharusnya Tidak

- (1) Menjadi pejabat pemerintah dengan memegang posisi permanen atau menerima gaji;
- (2) Menjadi pejabat atau karyawan dari sebuah lembaga negara, BUMN, atau pemerintah daerah, atau menjadi anggota dewan atau penasihat dari perusahaan negara atau lembaga negara;
- (3) Terlibat dalam pekerjaan atau profesi independen lainnya yang memiliki saham atau konflik kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam melaksanakan tugas anggota.

Bagian 2

Akuisisi Para Calon Komisaris NBTC Melalui Nominasi

Pasal 9. Untuk kepentingan pencalonan orang yang sesuai untuk dipilih sebagai Komisaris di Pasal 4, asosiasi-asosiasi, lembaga atau badan berikut harus memenuhi syarat pendaftaran dalam Sekretariat Senat:

(1) Asosiasi profesional penyiaran yang telah terdaftar sebagai badan hukum tidak kurang dari lima tahun;

(2) Asosiasi profesional bisnis telekomunikasi yang telah terdaftar sebagai badan hukum tidak kurang dari lima tahun;

(3) Lembaga pendidikan tinggi yang merupakan badan hukum dan memiliki program-program dalam komunikasi massa, jurnalisme atau media massa tidak kurang dari lima tahun;

(4) Lembaga pendidikan tinggi yang merupakan badan hukum dan memiliki program-program di bidang telekomunikasi tidak kurang dari lima tahun;

(5) Lembaga pendidikan tinggi yang merupakan badan hukum dan memiliki program-program dalam bidang hukum tidak kurang dari lima tahun;

(6) Lembaga pendidikan tinggi yang merupakan badan hukum dan memiliki program-program di bidang ekonomi tidak kurang dari lima tahun;

(7) Organisasi non-pemerintah yang beroperasi untuk keuntungan atau pendapatan bersama yang memiliki tujuan utama yang melindungi hak-hak konsumen atau mempromosikan hak-hak dan kebebasan konsumen, dan telah terdaftar sebagai badan hukum tidak kurang dari lima tahun;

(8) Organisasi non-pemerintah yang beroperasi untuk keuntungan atau pendapatan bersama yang memiliki tujuan utama yang berkaitan dengan pendidikan, budaya atau pengembangan sosial, dan telah terdaftar sebagai badan hukum tidak kurang dari lima tahun;

Asosiasi profesional di bawah ayat satu harus memiliki tujuan utama terkait dengan profesi yang anggotanya adalah para profesional di bidang penyiaran atau jasa telekomunikasi;

Asosiasi atau badan yang memenuhi syarat untuk pendaftaran dalam ayat (1) (2) (7) dan (8) akan menjadi asosiasi atau badan yang melakukan kegiatan lanjutan dengan catatan pekerjaan yang jelas. Jika suatu asosiasi atau badan memiliki beberapa tujuan utama, hanya satu kategori asosiasi atau badan itu dapat didaftarkan menurut (1) (2) (7) atau (8) dapat didaftarkan;

Ketika Sekretariat Senat telah mendaftarkan sebuah asosiasi, lembaga atau badan yang sesuai dengan ayat satu, akan dianggap lengkap. Keputusan pengadilan selanjutnya yang mengatakan bahwa pendaftaran batal tidak akan membahayakan tindakan yang diambil oleh Sekretariat Senat sebelum keputusan pengadilan;

Asosiasi, lembaga atau badan yang keberatan dengan pendaftaran yang sesuai dengan ayat satu berhak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha, tetapi gugatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu penagguhan suspensi atau penundaan nominasi atau seleksi di bawah Undang-Undang ini;

Pendaftaran asosiasi, lembaga atau badan yang sesuai dengan ayat satu harus sesuai dengan kriteria, prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Sekretariat Senat;

Sekretariat Senat mengumumkan daftar nama asosiasi yang terdaftar, lembaga atau badan kepada publik. Daftar tersebut akan berlaku sampai terjadi perkaitan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Sekretariat Senat.

Pasal 10. Ketika penyebab seleksi dan pengangkatan telah dilaksanakan, Sekretariat Senat harus mengumumkan melalui radio, televisi, surat kabar dan media elektronik setidaknya tujuh hari berturut-turut. Asosiasi, lembaga atau badan yang terdaftar dalam Pasal 9 yang ingin mencalonkan orang yang cocok sebagai Komisaris NBTC calon wajib menyampaikan nama bersama dengan surat persetujuan dalam waktu yang ditentukan oleh Sekretaris Jenderal Sekretariat Senat kriteria sebagai berikut:

(1) Setiap asosiasi profesional dalam Pasal 9 (1) dan lembaga pendidikan tersier dalam Pasal 9 (3) berhak mencalonkan dua orang sesuai dengan Pasal 6 (1);

(2) Setiap asosiasi profesional berdasarkan ayat 9 (2) dan lembaga pendidikan tinggi dalam Pasal 9 (4) berhak mencalonkan dua orang sesuai dengan Pasal 6 (2);

(3) Setiap lembaga pendidikan tinggi berdasarkan Pasal 9 (5) berhak untuk mencalonkan dua orang yang mempunyai catatan kerja yang jelas atau pengetahuan dan keahlian atau pengalaman dalam bidang hukum sesuai dengan Pasal 6 (3);

(4) Setiap lembaga pendidikan tinggi dalam Pasal 9 (6) berhak mencalonkan dua orang yang mempunyai catatan kerja yang jelas atau pengetahuan dan keahlian atau pengalaman dalam bidang ekonomi menurut Pasal 6 (3);

(5) Setiap organisasi non-pemerintah dalam Pasal 9 (7) berhak mencalonkan dua orang sesuai dengan Pasal 6 (4);

(6) Setiap organisasi non-pemerintah dalam Pasal 9 (8) berhak mencalonkan dua orang sesuai dengan Pasal 6 (5).

Asosiasi, lembaga atau badan yang terdaftar dalam Bagian 9 tidak mencalonkan kandidat apapun sesuai dengan ayat satu untuk alasan apapun tidak akan membatalkan proses seleksi yang dilakukan.

Pasal 11. Ketika waktu yang ditentukan dalam Pasal 10 telah berlalu, Sekretariat Senat akan menguji kualifikasi dari calon sebagai pembuktian sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 10. Dalam kasus di mana salah satu calon tidak memiliki kualifikasi yang tepat sesuai dengan Pasal 7 atau Pasal 10, Sekretariat wajib menginformasikan masing-masing asosiasi, lembaga atau badan untuk mencalonkan kandidat lain dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Sekretaris Jenderal Sekretariat Senat. Jika asosiasi, lembaga atau badan gagal mencalonkan kandidat dalam waktu yang ditentukan, hal tersebut akan dianggap bahwa mereka melepaskan hak untuk mengajukan seorang calon.

Ketika periode nominasi menurut ayat satu atau Pasal 10 sebagai kasus telah berlalu, dan jika calon apapun itu meninggal, atau dicabut persetujuannya untuk pencalonan, atau didiskualifikasi karena alasan apapun, Sekretariat Senat akan melanjutkan tanpa perlu mendapatkan nominasi lainnya.

Pasal 12. Ketika periode nominasi telah berlalu dan jumlah calon kurang dari dua kali jumlah yang ditentukan berdasarkan Pasal 13 (1) (2) (3) (4) dan (5), Sekretaris-Jenderal Sekretariat Senat akan memperpanjang periode nominasi tidak lebih dari tiga puluh hari sejak tanggal jatuh tempo yang ditentukan dalam Pasal 10.

Ketika periode perpanjangan berdasarkan ayat satu telah berlalu, dan jumlah nominasi masih kurang dari jumlah yang ditentukan dalam ayat satu, Sekretaris Tetap Perdana Menteri, Sekretaris Tetap Kementerian Pertahanan dan Sekretaris Tetap Kementerian Informasi dan Teknologi Komunikasi akan kolaboratif mencalonkan secara kolaboratif orang yang cocok untuk dipilih sebagai Komisaris yang

memiliki kualifikasi dan tidak berada di bawah salah satu larangan menurut Pasal 6 dan Pasal 7 untuk memenuhi nomor masing-masing kategori sebagaimana dimaksud pada ayat satu.

Pasal 13. Ketika periode nominasi dalam Pasal 10, Pasal 11 atau Pasal 12 sebagai kasus telah berlalu, Sekretariat Senat akan mengatur pertemuan semua calon untuk mengadakan pemilihan di antara mereka sesuai dengan prosedur sebagai berikut:

(1) Para calon berdasarkan Pasal 10 (1) dari asosiasi profesional dalam Pasal 9 (1) harus memilih dua di antara mereka sendiri untuk menjadi Komisaris NBTC sesuai Pasal 6 (1), masing-masing Dinas Siaran Suara dan Layanan Penyiaran Televisi; dan para calon di dalam Pasal 10 (1) dari lembaga di sesuai Pasal 9 (3) harus memilih dua di antara mereka sendiri untuk menjadi Komisaris NBTC sesuai Pasal 6 (1), masing-masing Dinas Siaran Suara dan Layanan Penyiaran Televisi;

(2) Para calon berdasarkan Pasal 10 (2) dari asosiasi profesional di dalam Pasal 9 (2) harus memilih dua di antara mereka sendiri untuk menjadi Komisaris NBTC sesuai Pasal 6 (2); dan nominasi sesuai Pasal 10 (2) dari lembaga sesuai Pasal 9 (4) harus memilih dua di antara mereka sendiri untuk menjadi anggota NBTC sesuai Pasal 6 (2);

(3) Para Calon berdasarkan Pasal 10 (3) dan Pasal 10 (4) harus terpisah memilih delapan di antara mereka sendiri untuk menjadi Komisaris NBTC sesuai Pasal 6 (3), empat masing-masing di bidang hukum dan ekonomi;

(4) Para calon berdasarkan Pasal 10 (5) akan memilih empat di antara mereka sendiri untuk menjadi Komisaris NBTC sesuai Pasal 6 (4) dari yang dua untuk mengatur penyiaran pelayanan dan dua untuk mengatur layanan telekomunikasi;

(5) Para calon berdasarkan Pasal 10 (6) harus memilih dua di antara mereka sendiri untuk menjadi Komisaris NBTC sesuai Pasal 6 (5).

Pemungutan suara harus sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Sekretariat Senat. Mereka yang mendapat perolehan suara tertinggi yang akan dipipih.

Setelah dilaksanakan pemilihan sesuai dengan ayat satu dan ayat dua, orang-orang yang terpilih sesuai ayat (1) (2) (3) (4) dan (5) akan dianggap sebagai orang yang memenuhi syarat sesuai dengan ayat (6) (1) (2) (3) (4) dan (5) dan keputusan bersifat final. Pemilihan harus diselesaikan dalam jangka waktu

tidak lebih sembilan puluh hari terhitung sejak tanggal pengumuman dibuat untuk asosiasi, lembaga atau badan yang terdaftar untuk menentukan pilihan orang yang cocok untuk menjadi Komisaris.

Bagian 3

Penerimaan Pendaftaran NBTC Komisaris Melalui Pemilihan

Pasal 14. Setelah dilaksanakan pemilihan dari NBTC, harus ada Komite peneliti yang memiliki tugas untuk memilih orang yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Komisaris. Komite peneliti terdiri atas lima belas anggota sebagai berikut:

- (1) Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- (2) Ketua Dewan Penasehat Ekonomi dan Sosial Nasional;
- (3) Sekretaris Tetap Kantor Perdana Menteri;
- (4) Sekretaris Tetap Kementerian Pertahanan;
- (5) Sekretaris Tetap Kementerian Informasi dan Komunikasi Teknologi;
- (6) Direktur Electronics dan Teknologi Komputer National Thailand;
- (7) Presiden Dewan Engineers;
- (8) Ketua Dewan Penyandang Cacat Thailand;
- (9) Ketua Asosiasi Seni Komunikasi Thailand;
- (10) Ketua Asosiasi profesi Konfederasi Radio dan Televisi;
- (11) Ketua Komite Koordinasi Organizations Non Pemerintah;
- (12) Ketua Dewan Direksi, Asosiasi Institute Direksi Thailand;
- (13) Ketua Asosiasi Jurnalis Penyiaran Thailand;
- (14) Ketua Federasi Komunitas Nasional;
- (15) Ketua Konfederasi Organisasi Perlindungan Konsumen.

Ketua dan anggota Komite peneliti tidak berhak untuk mendaftar sebagai Komite NBTC, dan organisasi yang tergolong ke dalam ayat satu tidak berhak untuk menentukan nominasi dalam yang tertulis dalam Bagian 2.

Para anggota Komite peneliti harus memilih salah satu di antara mereka sendiri untuk menjadi Ketua dan yang lain untuk menjadi sekretaris Komite peneliti.

Jika seluruh anggota panel peneliti tidak bias hadir atau jika ada anggota yang tidak dapat melakukan tugasnya, maka kehadiran anggota komite peneliti tidak boleh kurang dari setengah dari keseluruhan anggota.

Sekretariat Senat harus sekretariat Unit untuk pemilihan dan pengangkatan anggota.

Pasal 15. Dalam proses penelitian di bawah Bagian ini, Sekretariat Senat akan membuat pengumuman secara terbuka untuk pendaftaran dari orang yang memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 6 melalui radio, televisi, surat kabar dan media elektronik untuk setidaknya tiga puluh hari berturut-turut.

Seseorang yang memenuhi syarat untuk melamar untuk dipilih dalam pengangkatan sebagai Komisaris bukan orang yang sedang dicalonkan oleh asosiasi atau badan sesuai Pasal 10.

Ketika periode yang ditentukan sesuai dengan ayat satu telah berlalu, Komite peneliti akan memilih orang yang cocok untuk ditunjuk sebagai Komisaris pada jumlah ganda dari anggota yang sesuai dengan Pasal 6 (1) (2) (3) (4) dan (5).

Kriteria dan prosedur untuk seleksi harus ditentukan oleh Sekretaris Jenderal Sekretariat Senat. Orang-orang yang mendapat perolehan suara tertinggi yang akan dipilih.

Ketentuan Pasal 13 ayat tiga berlaku mutatis mutandis untuk pemilihan orang yang cocok untuk komite dari Komite peneliti.

Setiap orang yang gagal dalam penyarannya dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan tata usaha, namun ini tidak akan menyebabkan penangguhan atau penundaan prosedur yang dilakukan kecuali jika diperintah atau diatur oleh Pengadilan Tata Usaha. Dalam kasus di mana PTUN telah memutuskan atau memerintahkan bahwa orang yang dipilih adalah wajar tanpa pengecualian dan berada dalam salah satu larangan atau dipilih secara tidak sah, orang itu harus dikualifikasi sesuai tanggal yang ditetapkan oleh PTUN.

Bagian 4

Pemilihan dan Pengangkatan Komisaris

Pasal 16. Setelah menerima daftar nama orang yang cocok untuk diangkat sebagai komisaris NBTC Komisaris melalui nominasi menurut Pasal 2, dan melalui seleksi sesuai dengan Pasal 3, Sekretaris Jenderal Senat akan menyusun daftar nama tersebut menjadi satu. Jika jumlah orang yang cocok untuk diangkat sebagai Komisaris tidak kurang dari dua kali jumlah anggota sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 (1) (2) (3) (4) dan (5), daftar nama bersama dengan orang tersebut bio-data dan pekerjaan catatan orang tersebut, yang harus dinyatakan dengan jelas bersama dengan bukti-bukti yang menyatakan bahwa mereka memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 6, harus diserahkan kepada Presiden Senat dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal memperoleh daftar nama sesuai dengan Pasal 13 dan Pasal 15 untuk pertimbangan lebih lanjut dan resolusi Senat.

Dalam kasus di mana proses nominasi menurut Pasal 2, atau seleksi sesuai Pasal 3 tidak lengkap pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan dalam Pasal 13 ayat 3, Sekretaris Jenderal Sekretariat Senat harus menyerahkan daftar nama orang yang cocok untuk diangkat sebagai Komisaris diperoleh tanggal jatuh tempo bersama dengan, bio-data dan catatan kerja, yang jelas dinyatakan bersama dengan bukti-bukti yang menyatakan bahwa mereka memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 6, kepada Presiden Senat dalam waktu tiga puluh hari sebagaimana tanggal yang ditetapkan menurut Pasal 13 dan Pasal 15 untuk pertimbangan lebih lanjut dan resolusi Senat.

Pasal 17. Senat akan menyampaikan penetapan pemilihan orang yang dicalonkan dari daftar nama yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal Sekretariat Senat dalam waktu enam puluh hari sejak tanggal menerima daftar nama untuk ditunjuk sebagai Komisaris sesuai Pasal 6. Untuk tujuan ini, orang-orang yang mendapat suara tertinggi sesuai urutan harus dipilih sebagai Komisaris. pemungutan suara dilakukan secara rahasia. orang yang dipilih harus diberitahu.

Ketika waktu yang ditentukan pada ayat satu telah berlalu, jika jumlah Komisaris yang dipilih kurang dari jumlah yang ditentukan dalam Pasal 6, Presiden Senat wajib memberitahukan Perdana Menteri. Perdana Menteri harus menyerahkan daftar nama ke Dewan Menteri untuk pertimbangan dan

melakukan tindak lanjut untuk mendapatkan sejumlah lengkap dari Komisaris sesuai dengan Pasal 6 dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal pemberitahuan Perdana Menteri.

Orang-orang yang terpilih sebagai Komisaris sesuai ayat satu atau ayat dua boleh bertemu dan memilih salah satu Ketua dan dua Wakil Ketua dalam waktu lima belas hari sejak hari memperoleh jumlah orang lengkap yang dipilih sebagai Komisaris, yang hasilnya harus dilaporkan kepada Perdana Menteri. Kemudian Perdana Menteri demikian akan mengusulkan nama-nama kepada Raja untuk Command Kerajaan menunjuk posisi tersebut.

Pasal 18. Dalam kasus orang yang terpilih sesuai Pasal 17 berada pada salah satu larangan menurut Pasal 8 (1) (2) atau (3), Raja akan mengangkat, dengan saran dari Perdana Menteri, hanya ketika orang itu telah menyelesaikan masalah sesuai yang tercantum dalam Pasal 8 (1) atau (2), atau telah dikemukakan bukti untuk memenuhi keterlibatan dalam pekerjaan atau profesi sesuai dengan Pasal 8 (3) sudah berakhir. Ini harus dilakukan dalam waktu lima belas hari sejak tanggal pemilihan. Jika seseorang belum menyelesaikan masalah atau berhenti keterlibatan dalam pekerjaan atau profesi dalam waktu yang ditentukan, maka orang tersebut akan dianggap belum pernah terpilih sebagai Komisaris dan Senat akan memilih anggota lain dari daftar nama yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal Sekretariat Senat Menurut Pasal 16.

Bagian 5

Syarat dan Peletakan Jabatan

Pasal 19. Masa jabatan Komisaris enam tahun sejak tanggal diangkat oleh Raja dan akan melayani hanya satu periode.

Komisaris yang habis masa jabatannya akan melanjutkan tugas mereka sampai Raja mengeluarkan perintah kerajaan untuk mengangkat para komisariat yang baru.

Sebelum berakhirnya masa tugas, tidak kurang dari sembilan puluh hari, Sekretariat Senat akan mengatur proses pencalonan dan pengangkatan Komisaris baru tanpa penundaan.

Pasal 20. Selain peletakan jabatan pada saat berakhirnya periode, Komisaris meletakan jabatan disebabkan;

- (1) Meninggal dunia;
- (2) Usia mencapai tujuh puluh tahun;
- (3) Mengundurkan diri;
- (4) Didiskualifikasi atau berada dalam salah satu larangan dalam Pasal 7;
- (5) Pelanggaran dalam Pasal 8;
- (6) Dihentikan berdasarkan penetapan Senat dalam Pasal 21;
- (7) Dikeluarkan oleh penetapan Senat berdasarkan Undang-Undang Organik dalam Anti-Korupsi;

Peletakan jabata berdasarkan ayat (1) (2) atau (3) harus dibawa ke Raja untuk pengakuan-Nya. Jika ada peletakan jabatan berdasarkan ayat (4) (5) (6) atau (7), masalah ini harus diajukan kepada Raja untuk perintah kejaraan untuk mencopot jabatan komisaris. Perintah Kerajaan berlaku dari tanggal orang tersebut dikatakan diskualifikasi, atau berada dalam salah satu larangan, atau pada saat melanggar undang-undang, atau pada senat menetapkan orang tersebut untuk meletakan jabatan, atau saat ia dikeluarkan.

Jika ada masalah berdasarkan ayat satu, Komisaris yang ada dapat terus melaksanakan tugas dan dianggap bahwa NBTC terdiri dari Komisaris yang ada tetapi tidak kurang dari enam orang.

Dalam kasus di mana Komisaris meletakan jabatan sebelum menyelesaikan masa jabatannya, orang yang ditunjuk sebagai penggantinya akan menjabat sampai berakhir masa jabatan orang yang ia gantikan. Dalam kasus dimana masa jabatan tersisa kurang dari tiga tahun, ia brhak dipilih untuk kembali untuk satu kali masa jabata.

Dalam kasus di mana Ketua atau Wakil Ketua meletakan jabatan dengan sebab yang berdasarkan ayat satu, Komisaris NBTC akan memilih salah satu di antara mereka sendiri untuk menjadi Ketua atau Wakil Ketua dan menginformasikan kepada Perdana Menteri untuk pengakuannya dimana Perdana Menteri akan mengusulkan nama kepada Raja untuk menunjuk orang tersebut sebagai Ketua atau Wakil Ketua sebagaimana mestinya.

Pasal 21. Anggota DPR atau Senat tidak kurang dari seperempat dari total jumlah anggota yang ada dari masing-masing bagian memiliki hak untuk mengajukan kepada Presiden Senat untuk meminta

Senat meluluskan penetapan pemberhentian komisaris dari jabatannya karena perilaku kotor atau kelalaian dalam melaksanakan tugas.

Penetapan Senat pada ayat satu harus disahkan melalui pemilihan tidak kurang dari tiga perempat dari jumlah anggota Senat.

Pasal 22. Seandainya terjadi peristiwa dimana NBTC gagal dalam melakukan tugas mereka secara efisien sebagaimana diatur oleh undang-undang, orang-orang berikut berhak untuk mengajukan kepada Presiden Senat untuk meminta Senat mensahkan penetapan dan memberhentikan semua Komisaris NBTC dari jabatan:

- (1) Anggota DPR tidak kurang dari seperempat dari jumlah total anggota DPR yang ada;
- (2) Anggota Senat tidak kurang dari seperempat dari jumlah total anggota Senat yang ada;
- (3) Tidak kurang dari 20.000 orang yang merupakan pengguna layanan dipengaruhi oleh tindakan sesuai dengan ayat satu. Keluhan harus diajukan dengan Presiden Senat sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Presiden Senat.

Suatu Penetapan Senat pada ayat satu harus disahkan melalui pemilihan tidak kurang dari dua pertiga dari jumlah anggota Senat yang ada. Dalam membuat ketetapan, Laporan Pemantauan dan Komite Evaluasi diserahkan kepada Senat dan harus dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 72.

Dalam kasus dimana semua Komisaris meletakkan jabatan dengan penyebab berdasarkan ayat satu, keadaan tersebut akan dibiarkan sampai Komisaris diangkat, kecuali hanya jika diperlukan.

Bagian 6

Sidang, Wewenang dan Tugas Komisi

Pasal 23. Pelaksanaan rapat, membuat penetapan dan melakukan tugas NBTC harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh NBTC.

Apa Komisaris yang memiliki kepentingan dalam hal yang dipertimbangkan tidak berhak untuk menghadiri sidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, NBTC dapat menunjuk satu atau lebih dari satu Komisaris untuk bertindak atas namanya. NBTC tidak boleh membantah jawaban dengan alasan bahwa Komisaris telah dipercayakan untuk melakukan tugas tersebut.

Pasal 24. Pelaksanaan Tugas NBTC, BC dan TC dalam hal-hal yang berkaitan dengan atau memiliki dampak pada kepentingan umum harus dilakukan melalui ketetapan siding. Berita acara siding dan hasil keputusan yang dibuat secara individu maupun sebagai kelompok harus diungkapkan kepada publik melalui media elektronik dari Kantor NBTC dan hal lain-lain yang ditentukan oleh NBTC.

Informasi yang terkandung dalam berita acara sidang yang tidak tunduk pada pengungkapan sesuai dengan Undang-Undang Informasi resmi, NBTC bisa meluluskan suatu ketetapan bahwa informasi khusus tidak akan diumumkan.

Pengungkapan notulen rapat dan hasil keputusan berdasarkan ayat satu harus dilakukan dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal penetapan, tetapi dapat diperpanjang tidak lebih dari lima belas hari dalam kasus yang diperlukan. Dalam hal ini, alasan dan pembenaran untuk perpanjangan harus diberikan.

Pasal 25. Komisaris (para) akan dianggap sebagai orang yang memegang posisi tinggi di bawah Undang-Undang Organik tentang Anti Korupsi dan akan menjadi pejabat yang berwenang di bawah KUHP.

Pasal 26. Ketua, Wakil Ketua dan Komisaris lainnya akan melakukan pekerjaan penuh waktu. Ketua, Wakil Ketua dan Komisaris lainnya akan menerima upah secara bulanan sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Kerajaan.

Ketua, Wakil Ketua dan Komisaris lainnya boleh mencairkan untuk tunjangan perjalanan yang timbul dari menjalankan tugas di daerah lain tidak melebihi tarif yang ditentukan dalam Keputusan Royal.

Pasal 27. NBTC memiliki kewenangan dan tugas sebagai berikut:

(1) Untuk merumuskan Frekuensi Manajemen Master Plan, Tabel Alokasi Frekuensi, Broadcasting Master Plan, Telekomunikasi Master Plan, Rencana Frekuensi, dan Telekomunikasi Numbering Plan;

(2) Untuk menetapkan frekuensi radio untuk usaha penyiaran suara, siaran televisi, komunikasi radio, dan jasa telekomunikasi;

(3) Untuk menentukan karakteristik dan kategori penyiaran suara, siaran televisi, dan jasa telekomunikasi;

(4) Untuk membiri izin dan mengatur penggunaan frekuensi radio dan peralatan komunikasi radio dalam usaha penyiaran suara, siaran televisi dan layanan telekomunikasi, atau layanan komunikasi radio; dan merumuskan kriteria perizinan dan prosedur, kondisi, atau biaya lisensi;

(5) Untuk merumuskan kriteria untuk efisiensi penggunaan frekuensi radio tanpa menyebabkan gangguan dengan jenis usaha yang sama dan jenis usaha lainnya;

(6) Untuk membiri izin dan mengatur operasi penyiaran suara, siaran televisi dan layanan telekomunikasi untuk membebaskan pengguna layanan untuk memiliki pilihan layanan dengan kualitas, efisiensi, ketepatan waktu, keandalan dan keadilan; dan merumuskan kriteria perizinan dan prosedur, kondisi, atau biaya lisensi;

(7) Untuk membiri izin dan mengatur penggunaan nomor telekomunikasi; dan merumuskan kriteria perizinan dan prosedur, kondisi, atau biaya perizinan;

(8) Untuk merumuskan kriteria dan prosedur untuk interkoneksi, dan kriteria dan prosedur untuk menetapkan biaya akses atau biaya interkoneksi yang diterapkan pada usaha penyiaran suara, siaran televisi dan layanan telekomunikasi, baik untuk jenis usaha yang sama dan jenis usaha lainnya, yang berlaku adil pada pengguna jasa, penyedia layanan dan investor, atau antara penyedia layanan telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan umum;

(9) Untuk mengatur struktur tarif dan harga untuk penyiaran suara, siaran televisi dan layanan telekomunikasi yang berlaku adil kepada pengguna jasa dan penyedia layanan dengan memperhatikan kepentingan umum;

(10) Untuk menetapkan standar dan spesifikasi teknis yang diperlukan untuk penyiaran suara, siaran televisi, telekomunikasi dan jasa komunikasi radio;

(11) Untuk menentukan ukuran untuk pencegahan perilaku anti-kompetitif atau persaingan tidak sehat di bidang penyiaran suara, siaran televisi dan layanan telekomunikasi;

(12) Untuk menentukan ukuran untuk ketentuan layanan telekomunikasi secara universal dan setara sesuai dengan Pasal 50;

(13) Untuk melindungi hak dan kebebasan orang-orang dieksploitasi oleh operator; melindungi hak pribadi secara perorangan dan kebebasan untuk berkomunikasi dengan secara telekomunikasi; mempromosikan hak, kebebasan dan kesetaraan masyarakat dalam mendapatkan akses, dan penggunaan frekuensi di penyiaran suara, siaran televisi dan layanan telekomunikasi;

(14) Melakukan koordinasi hal yang berkaitan dengan manajemen frekuensi, baik di tingkat nasional dan internasional;

(15) Untuk menentukan dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan gangguan frekuensi;

(16) Untuk memantau dan memberikan nasihat tentang usaha penyiaran suara, siaran televisi dan layanan telekomunikasi;

(17) Untuk menetapkan peraturan tentang penggabungan, pemindahan kepemilikan-holding atau dominasi pasar penyiaran di kalangan bisnis media massa atau dengan orang lain, yang memiliki efek menghambat kebebasan masyarakat untuk mendapat informasi atau menghalangi akses publik terhadap perbedaan suatu informasi;

(18) Untuk mempromosikan pembentukan perizinan, penyiaran, dan media massa profesional dalam bisnis radio dan televisi kedalam bentuk-bentuk organisasi yang berbeda yang akan memiliki mandat untuk menetapkan standar etika dan penataan menjadi yang berkaitan dengan pekerjaan atau profesi di bawah standar etika;

(19) Untuk mengeluarkan aturan atau pemberitahuan sesuai dengan Pasal 58;

(20) Untuk menyetujui anggaran Kantor anggaran NBTC, termasuk pembiayaan Dana berdasarkan Pasal 55;

(21) Untuk menentukan dan menyetujui alokasi keuangan untuk Dana seperti yang diusulkan oleh Komite Manajemen Dana berdasarkan Pasal 55;

(22) Untuk memberikan informasi dan berpartisipasi dalam negosiasi atau membuat perjanjian antara Kerajaan Thailand dan pemerintah asing atau organisasi internasional dalam hal yang berkaitan dengan manajemen frekuensi, siaran suara, siaran televisi, layanan telekomunikasi, atau usaha lain yang terkait;

(23) Untuk memberikan saran kepada Kabinet untuk penerbitan, atau perubahan, undang-undang yang berkaitan dengan alokasi frekuensi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan frekuensi, siaran suara, siaran televisi, dan jasa telekomunikasi;

(24) Untuk menentukan aturan, pemberitahuan atau perintah di bawah kekuasaan dan tugas NBTC;

(25) Untuk melakukan setiap keputusan lainnya sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini atau hukum lainnya.

Dalam menetapkan sebagai peraturan tentang penggabungan, pemindahan kepemilikan atau dominasi pasar dalam ayat (17), NBTC akan menerima pendapat dari masyarakat dan pihak terkait.

Pelaksanaan wewenang dan tugas berdasarkan ayat satu tidak akan bertentangan dengan atau tidak konsisten dengan undang-undang penyiaran bisnis, UU Bisnis Telekomunikasi dan UU komunikasi radio.

Aturan tersebut, pemberitahuan atau perintah yang telah disebutkan mulai berlaku dan diterbitkan dalam Berita Negara.

Pasal 28. NBTC akan mendengarkan pendapat masyarakat untuk mengambil pendapat-pendapat untuk sebagai pertimbangan sebelum mengeluarkan aturan, pemberitahuan, atau perintah yang berkaitan dengan pengawasan penyiaran suara, siaran televisi dan layanan telekomunikasi yang akan dilaksanakan pada umumnya dan terkait dengan persaingan dalam bisnis atau mungkin memiliki dampak signifikan pada masyarakat. NBTC harus menyediakan latar belakang, informasi alasan, pembenaran, dan ringkasan dari hal-hal yang terkait, serta isu-isu yang diharapkan dari sidang. Waktu yang dibutuhkan untuk sidang tidak kurang dari tiga puluh hari, kecuali untuk kasus darurat atau kebutuhan yang mendesak NBTC boleh memberikan waktu yang lebih singkat untuk dengar pendapat tersebut.

Kantor NBTC harus menyiapkan catatan ringkasan sidang yang terdiri dari pendapat yang diperoleh, penetapan NBTC atau pertimbangan mengenai pendapat tersebut, termasuk alasan dan tindakan yang diusulkan. Catatan ini akan dipublikasikan melalui Kantor sistem jaringan informasi NBTC ini.

Pasal 29. Dalam menetapkan tarif untuk akses jaringan atau biaya interkoneksi, ongkos atau biaya layanan untuk usaha penyiaran suara, siaran televisi dan layanan telekomunikasi di bawah Undang-Undang ini dan UU Penyiaran Bisnis atau Undang-Undang Bisnis Telekomunikasi, NBTC harus

memperhatikan sebagaimana mestinya untuk kepentingan umum dan beban konsumen, biaya jasa penyelidikan, optimasi dan alokasi sumber daya yang efisien.

Pasal 30. Dalam melaksanakan tugas NBTC, BC, TC, komite lain dan sub-komite yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini, termasuk Sekretaris Jenderal NBTC dan staf dari Kantor NBTC dalam kaitannya dengan permintaan atau keluhan yang diajukan sesuai dengan hukum, aturan, peraturan, pemberitahuan atau kontrak bahwa NBTC atau Kantor NBTC membuat dengan swasta, dan jika batas waktu tidak ditentukan dalam hukum, aturan, peraturan, pemberitahuan atau kontrak yang dimaksud, NBTC akan mengatur batas waktu yang ditentukan dan memberitahu masyarakat. Untuk setiap masalah, seandainya batas waktu tidak diberikan, pihak berwenang harus menyelesaikannya dalam waktu lima belas hari sejak tanggal penerimaan permohonan.

Dalam kasus di mana NBTC, BC, TC, komite lain dan sub-komite yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini, Sekretaris Jenderal NBTC dan staf dari Kantor NBTC memperpanjang pelaksanaan tugas mereka sampai saat kemudian dari apa yang ditetapkan pada ayat satu tanpa alasan yang dibenarkan dan jika hal itu menyebabkan kerusakan pada setiap orang, Kantor NBTC bertanggung jawab untuk membuat kompensasi kepada orang tersebut. Jumlah uang yang dibayarkan untuk kompensasi tersebut akan dibebankan kepada NBTC, BC, TC, komite lain dan sub-komite yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini, Sekretaris Jenderal NBTC dan staf dari Kantor NBTC yang merupakan penyebab dari penundaan sebagai kasus yang memungkinkan kerusakan tersebut terjadi dari tindakan atau masalah internal atau dengan kelalaian.

Pasal 31. Untuk kepentingan perlindungan konsumen dari usaha eksploitasi oleh penyiaran suara, siaran televisi dan telekomunikasi operator, NBTC mempunyai tugas untuk memeriksa operator untuk mencegah mereka dari mengambil tindakan apa pun yang dapat dianggap sebagai perlakuan yang tidak adil. NBTC akan mendirikan dua sub komite terdiri dari orang yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang bermanfaat bagi pelaksanaan tugas NBTC dalam perlindungan konsumen dalam mengajukan layanan penyiaran, dan perlindungan konsumen dalam mengajukan layanan telekomunikasi. Komite sub mempunyai tugas dan wewenang dalam membuat keputusan dan rekomendasi dalam hal yang berkaitan dengan keluhan yang diajukan dan tugas lain yang diperlukan oleh NBTC.

Dalam kasus di mana penyiaran suara, siaran televisi dan operator telekomunikasi bertindak dengan cara apapun yang mungkin dianggap sebagai perlakuan tidak adil kepada konsumen dengan menggunakan jaringan atau iklan mereka dengan cara pembuatan keuntungan yang tidak semestinya, atau menyebabkan gangguan sebagaimana ditentukan oleh NBTC, NBTC mempunyai wewenang untuk memerintahkan operator untuk menahan diri dari mengambil tindakan tersebut.

Pasal 32. Untuk kepentingan melindungi hak pribadi secara perorangan dan kebebasan untuk berkomunikasi dengan menggunakan telekomunikasi, NBTC memiliki wewenang untuk menentukan ukuran untuk perlindungan hak pengguna layanan telekomunikasi 'terkait dengan informasi pribadi, hak privasi dan kebebasan untuk berkomunikasi dengan alat telekomunikasi.

Dalam kasus di mana ada pelanggaran penyadapan secara ilegal, pemanfaatan atau pengungkapan pesan, informasi atau data lainnya dengan cara telekomunikasi, itu dianggap bahwa NBTC adalah pihak yang merusak dan berada dibawah hukum acara pidana.

Dalam kasus di mana pemegang lisensi bisnis telekomunikasi adalah pelaku dalam ayat dua, atau tahu bahwa pelanggaran tersebut dilakukan berdasarkan ayat dua tetapi membuat seakan-akan tidak terjadi apa-apa atau mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum dalam waktu yang wajar, NBTC harus memiliki wewenang untuk menghentikan sementara atau mencabut izin usaha telekomunikasi tersebut.

Pasal 33. NBTC harus memiliki wewenang untuk menunjuk sub-komite, kelompok kerja, atau menetapkan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini atau tugas-tugas lain yang mungkin ditugaskan.

Sub-komite dan kelompok kerja tidak boleh berada dalam larangan sebagaimana dibahas dalam Pasal 7 B. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) dan (11).

Pasal 34. Dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini, NBTC, BC, TC dan Pemantau dan Komite Evaluasi memiliki wewenang untuk memanggil setiap lembaga negara atau orang untuk meminta informasi faktual, pernyataan-pernyataan atau dokumen yang relevan atau bukti untuk tujuan penyelidikan .

BAB II

Peraturan Operasi Bisnis

Bagian 1

Komisi Penyiaran

Pasal 35. Harus ada satu Komisi Penyiaran, yang disebut singkatnya "KP" yang terdiri dari:

- (1) Ketua yang ditunjuk oleh NBTC dari Wakil Ketua NBTC;
- (2) Empat Komisaris yang ditunjuk oleh NBTC dari Komisaris yang bukan merupakan Ketua atau Wakil Ketua yang terdiri dari dua anggota sesuai dengan Pasal 6 (3) dan satu Komisaris sesuai dengan Pasal 6 (4).

Komisi menurut ayat satu tidak boleh diangkat sebagai TC pada waktu bersamaan.

Sekretaris Jenderal NBTC menunjuk pejabat berwenang dari Kantor NBTC sebagai sekretaris dan asisten sekretaris bila diperlukan.

Pasal 36. Ketentuan Pasal 23 mutatis mutandis berlaku untuk pertemuan BC kecuali bagian dari kuorum yang tidak kurang dari setengah dari jumlah total Komisaris diperlukan untuk memenuhi kuorum.

Dalam kasus di mana Komisaris Penyiaran meletakkan jabatan sebelum menyelesaikan tugas dalam jangka waktu yang ditentukan dan jika Komisaris yang ada tidak kurang dari tiga orang, Komisaris yang tersisa dapat terus melakukan tugas.

Pasal 37. BC harus memiliki wewenang untuk bertindak atas nama NBTC berdasarkan ketentuan Pasal 27 (4) (6) (8) (9) (10) (11) (13) (16) dan (18) berkaitan dengan jasa penyiaran, dan tugas lainnya yang diberikan oleh NBTC.

Bagian 2

Komisi Telekomunikasi

Pasal 38. Harus ada satu Komisi Telekomunikasi, singkatnya "TC" yang terdiri dari:

(1) Ketua yang ditunjuk oleh NBTC dari Wakil Ketua NBTC;

(2) Komisaris kami ditunjuk oleh NBTC dari Komisaris yang bukan merupakan Ketua atau Wakil

Ketua yang terdiri dari dua Komisaris sesuai dengan Pasal 6 (3) dan satu Komisaris sesuai dengan Pasal 6 (4).

Komisaris sesuai dengan ayat satu tidak boleh diangkat sebagai SM pada waktu yang sama.

Sekretaris Jenderal NBTC akan menunjuk pejabat berwenang dari Kantor NBTC sebagai sekretaris dan asisten sekretaris bila diperlukan.

Pasal 39. Ketentuan Pasal 36 akan menerapkan mutatis mutandis untuk pertemuan dan pelaksanaan tugas TC.

Pasal 40. TC harus memiliki wewenang untuk bertindak atas nama NBTC berdasarkan ketentuan Pasal 27 (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) dan (16) yang berkaitan dengan telekomunikasi dan layanan komunikasi radio, dan tugas lainnya yang diberikan oleh NBTC.

Bagian 3

Peraturan Penyiaran

Pasal 41. Setiap orang yang ingin menggunakan frekuensi radio untuk keperluan layanan penyiaran atau televisi yang bersuara harus mendapatkan perizinan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pelaksanaan perizinan dan izin harus sesuai dengan kriteria, prosedur, dan kondisi seperti yang ditentukan oleh NBTC, kecuali untuk tujuan operasi bisnis yang ditetapkan dan berlaku dalam ayat enam.

Hal tersebut dianggap bahwa permohonan izin frekuensi radio sesuai dengan ayat satu diatas merupakan pelaksanaan untuk operasi penyiaran atau televisi layanan suara sesuai dengan Undang-

Undang-Undang Penyiaran Bisnis; dan ketika NBTC memperbolehkan penggunaan frekuensi radio, itu akan dianggap bahwa pemohon diizinkan untuk mengoperasikan siaran atau televisi layanan suara sesuai Undang-Undang Penyiaran Bisnis dan dianggap bahwa orang tersebut diizinkan untuk memiliki dan boleh menggunakan peralatan komunikasi radio dan menggunakan komunikasi radio sesuai Undang-Undang komunikasi radio dengan ketentuan penggunaan peralatan komunikasi radio sebagaimana ditentukan dalam pelaksanaan tersebut.

Perizinan dalam menggunakan frekuensi radio untuk keperluan penyiaran atau televisi layanan suara harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan publik maksimal di tingkat nasional, regional dan lokal yang berkaitan dalam bidang pendidikan, budaya, keamanan negara dan kepentingan umum lainnya, termasuk kebebasan dan persaingan yang sehat, dan harus dilakukan dengan cara yang tepat dan mendistribusikan kegunaan sebagai sumber daya komunikasi nasional untuk semua segmen perusahaan dan kepentingan umum.

Manfaat mempromosikan program radio dan televisi yang isinya bermanfaat kepada masyarakat atau program untuk anak-anak dan pemuda, NBTC akan mengatur permohonan izin kepada pihak yang membutuhkan izin untuk menyiarkan program-program ini pada waktu yang tepat untuk kelompok sasaran.

Masalah perizinan frekuensi radio untuk penyiaran atau televisi layanan suara yang merupakan operasi bisnis sebagaimana diatur dalam Undang-undang Penyiaran Bisnis, seleksi harus dilakukan dengan cara lelang spektrum di tingkat nasional, regional dan lokal. Pelelangan dilakukan secara terpisah dan sesuai dengan kriteria, prosedur, tanggal, dan kondisi seperti yang ditentukan oleh NBTC.

Dalam menentukan kualifikasi orang yang memenuhi syarat untuk melelang berdasarkan ayat enam, pertimbangan diberikan untuk kepentingan dari alokasi yang efisien dan penggunaan sumberdaya yang optimal, untuk mencegah perilaku persaingan yang tidak sehat. Supaya terjadi persaingan bebas dan adil, penyediaan jasa yang efisien, tidak beban pada konsumen, dan para pemegang izin mendapatkan perlindungan yang tepat untuk mengoperasikan bisnis di tingkat regional dan lokal.

Perizinan frekuensi radio untuk layanan penyiaran dan siaran televisi suara yang menyebabkan atau menimbulkan gangguan atau sama dengan frekuensi radio yang sudah ada harus batalan.

Pasal 42. NBTC memiliki kewenangan untuk menetapkan biaya izin berdasarkan pada Pasal 41 yang terdiri dari biaya izin spektrum dan biaya izin usaha yang harus dibayar ketika perizinan telah diberikan. Pembayaran akan dilakukan setiap tahun sesuai tingkatan jenis perizinan dan sesuai dengan undang-undang penyiaran bisnis, kecuali untuk biaya perizinan spektrum dalam operasi bisnis. Jumlah uang yang diterima dari lelang menurut Pasal 41 ayat enam dianggap sebagai biaya perizinan spektrum yang harus dibayar karena telah diterbitkan perizinan dan disetorkan ke Dana berdasarkan Pasal 52.

Biaya perizinan berdasarkan ayat satu yang harus dibayar tahunan, yang ditentukan oleh NBTC dengan pertimbangan sebagai biaya regulasi, pemanfaatan spektrum dan operasi bisnis secara efektif pada tingkat bruto tidak lebih dari dua persen dari pemasukan sebelum dikurangi pembayaran perizinan. Biaya akan diserahkan ke Kantor NBTC sebagai pendapatan.

Agen dibebaskan dari kewajiban memenuhi Undang-undang Penyiaran Bisnis, baik seluruhnya atau sebagian, wajib membayar sesuai dengan ayat satu. NBTC akan mengurangi biaya yang dianggap perlu dengan memperhatikan tujuan lembaga'.

Pasal 43. Sebuah perizinan frekuensi radio untuk layanan penyiaran dan siaran televisi suara adalah hak eksklusif pemegang izin dan tidak dapat dipindahtangankan.

Pemegangizin yang telah diizinkan untuk menggunakan spektrum untuk penyiaran suara atau operasi bisnis penyiaran televisi wajib melaksanakannya. Manajemen bisnis baik secara keseluruhan atau sebagian tidak boleh diberikan atau diizinkan kepada pihak lain untuk bertindak atas namanya orang lain. Tapi mengalokasikan sebagian kecil waktu untuk orang lain untuk menjalankan program harus diperbolehkan sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh NBTC.

Pasal 44. Pemegangizin yang telah diberi kuasa untuk menggunakan spektrum penyiaran suara atau operasi bisnis penyiaran televisi yang tidak melaksanakan bisnis dengan menggunakan spektrum tersebut dalam waktu yang telah ditentukan oleh NBTC, atau telah menggunakan spektrum seperti di layanan lain tapi tidak berhubungan dengan tujuannya, atau gagal untuk memenuhi persyaratan operasi bisnis, atau melakukan tindakan terlarang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 (11) dan (17), atau gagal untuk mematuhi ketentuan Pasal 43, NBTC harus mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi atau mengeluarkan perintah untuk mencabut izin spektrum secara keseluruhan atau sebagian.

Bagian 4

Peraturan Telekomunikasi

Pasal 45. Siapa saja yang ingin menggunakan spektrum untuk tujuan operasi bisnis telekomunikasi akan mendapatkan perizinan berdasarkan Undang-Undang ini dengan cara lelang spektrum sesuai dengan kriteria, prosedur, durasi, dan kondisi seperti yang ditentukan oleh NBTC. Ketentuan Pasal 41 ayat empat dan ayat tujuh diberlakukan mutatis mutandis. Pendapatan dari lelang spektrum setelah dikurangi pengeluaran harus disetorkan ke kas negara.

Ini dianggap bahwa pengajuan permohonan izin spektrum menurut ayat satu juga merupakan permohonan untuk operasi bisnis telekomunikasi di bawah Undang-Undang Telekomunikasi Bisnis; dan ketika NBTC memperbolehkan penggunaan spektrum, itu dianggap bahwa pemohon diizinkan untuk melakukan operasi bisnis telekomunikasi sesuai Undang-Undang Telekomunikasi Bisnis dan dianggap bahwa orang tersebut diizinkan untuk memiliki dan menggunakan peralatan komunikasi radio dan menempatkan stasiun komunikasi radio sesuai UU komunikasi radio dengan merawat peralatan komunikasi radio sebagaimana ditentukan dalam aplikasi.

NBTC memiliki kewenangan untuk menetapkan biaya perizinan sesuai Undang-Undang Telekomunikasi Bisnis dan biaya yang harus dibayar setiap tahun dengan memperhatikan biaya-biaya regulasi pemanfaatan spektrum dan operasi bisnis secara efektif pada tingkat bruto tidak lebih dari dua persen dari pemasukan sebelum dikurangi pengeluaran. Biaya akan diserahkan ke Kantor NBTC sebagai pendapatan.

Pasal 46. Perizinan spektrum untuk bisnis telekomunikasi adalah hak eksklusif pemegang izin dan tidak dapat dipindahtangankan.

Penegangizin yang telah diizinkan untuk menggunakan spektrum untuk layanan telekomunikasi harus melaksanakannya sendiri, manajemen bisnis baik secara keseluruhan atau sebagian tidak boleh diberikan atau diizinkan kepada pihak lain untuk bertindak atasnya.

Pasal 47. Setiap pemegangizin yang telah diizinkan untuk menggunakan spektrum untuk layanan telekomunikasi yang belum melaksanakan bisnis dengan menggunakan spektrum tersebut dalam jangka

waktu yang ditentukan oleh NBTC atau dengan menggunakan spektrum seperti di layanan lain tidak berkaitan dengan tujuan atau gagal untuk mematuhi operasi bisnis, atau melakukan tindakan terlarang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 (11), atau gagal untuk mematuhi ketentuan Pasal 46, NBTC harus mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi atau mengeluarkan perintah untuk mencabut izin spektrum secara keseluruhan atau sebagian.

BAB III

Panduan Penyusunan Perencanaan

Pasal 48. Harus ada Master Plan dalam Pengelolaan Spektrum yang harus memuat setidaknya hal-hal berikut:

- (1) Rincian dari tabel semua Alokasi Frekuensi dimana Thailand bisa menggunakan;
- (2) Kerangka pelaksanaan untuk masalah-masalah spektrum Internasional;
- (3) Rincian dari spektrum yang dialokasikan untuk penyiaran radio dan layanan siaran televisi, layanan telekomunikasi, dan jasa lainnya;
- (4) Panduan pembaharuan spektrum untuk meningkatkan pemanfaatan spektrum.

Master Plan Pengelolaan Spektrum mulai berlaku setelah dipublikasikan dalam Berita Negara dan harus digunakan sebagai kriteria dan kondisi awal untuk perizinan dan semua kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan spektrum.

NBTC harus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Master Plan Pengelolaan Spektrum dan merevisi Master Plan tersebut untuk kepentingan Pengelolaan spektrum yang efisien dan sejalan dengan kemajuan perubahan teknologi.

Dalam penyusunan Master Plan Pengelolaan Spektrum, NBTC akan melakukan dengar pendapat untuk mengumpulkan opini masyarakat, operator bisnis menggunakan spektrum dan lembaga negara yang bersangkutan untuk mengambil pendapat-pendapat tersebut sebagai badan pertimbangan. Waktu yang dibutuhkan untuk dengar pendapat tidak kurang dari tiga puluh hari. Persiapan Master Plan Pengelolaan Spektrum akan memperhatikan keamanan nasional sebagai mana diperlukan.

Pasal 49. Dalam regulasi bisnis Telekomunikasi, NBTC menyusun Master Plan Penyiaran dan Master Plan Telekomunikasi sehingga dapat menerapkan panduan lima tahun. Rencana harus sesuai dengan Master Plan Pengelolaan Spektrum dan minimal harus memberikan panduan untuk pengembangan dan promosi persaingan bebas dan adil di antara operator, panduan untuk perizinan spektrum dan perizinan usaha. Pada bagian pelayanan penyiaran, sector publik akan diizinkan untuk menggunakan frekuensi untuk kepentingan publik dan nirlaba untuk pelayanan masyarakat dalam proporsi tidak kurang dari dua puluh persen dari frekuensi yang dialokasikan di masing-masing daerah yang mendapatkan perizinan.

Dalam penyusunan Master Plan berdasarkan ayat satu, NBTC akan mengadakan dengar pendapat dari masyarakat, operator dan lembaga negara yang bersangkutan untuk mengambil opini-opini sebagai bahan pertimbangan. Waktu yang dibutuhkan untuk sidang tidak kurang dari tiga puluh hari.

Dalam kasus di mana keputusan NBTC bertentangan dengan pendapat masyarakat, operator atau lembaga negara menyatakan pada sidang dinyatakan dalam dengar pendapat berdasarkan ayat dua, NBTC akan memberikan penjelasan lebih lanjut dan alasan kepada masyarakat, operator atau lembaga negara.

Masyarakat, operator dan lembaga negara berdasarkan ayat tiga yang menganggap bahwa Master Plan seperti yang ditentukan oleh NBTC bertentangan dengan ketentuan Konstitusi Kerajaan Thailand. Mereka memiliki hak untuk mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Tata Usaha. Master Plan dianggap menjadi aturan di bawah UU tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha dan Prosedur Administrasi Pengadilan.

Master Plan pada ayat satu menjadikan NBTC dan lembaga negara memperhatikan pengumuman dalam Berita Negara.

Pasal 50. Untuk kepentingan penyediaan telekomunikasi berbasis universal dan pelayanan sosial sesuai dengan UU Telekomunikasi Bisnis, NBTC akan menetapkan rencana untuk telekomunikasi berbasis universal dan pelayanan sosial dimana.

Sehubungan dari paragraph diatas menentukan area layanan dan kelompok sasaran, menerapkan periode termasuk perkiraan anggaran untuk operasi.

Dalam penyusunan rencana berdasarkan ayat satu, NBTC akan berkonsultasi dengan lembaga negara lainnya yang bersangkutan dan memastikan bahwa hal tersebut konsisten dengan kebijakan pemerintah yang dinyatakan kepada Majelis Nasional.

NBTC harus menentukan jumlah biaya yang akan dibebankan dari pemegang izin diizinkan untuk mengoperasikan bisnis telekomunikasi untuk penyediaan layanan telekomunikasi sesuai dengan ayat satu. Dalam hal ini, pertimbangan harus diberikan untuk pendapatan perizinan dari operasi bisnis telekomunikasi.

NBTC harus menentukan jumlah biaya dari Dana USO sesuai Pasal 53 (4) yang harus ditetapkan untuk mendukung pemegang izin dalam memberikan pelayanan universal.

Pasal 51. Untuk meningkatkan kemampuan sektor publik dalam spektrum memanfaatkan dalam proporsi yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat satu, NBTC akan menetapkan kriteria dan prosedur untuk mendukung masyarakat agar memiliki potensi untuk memenuhi syarat untuk memperoleh izin penyiaran untuk jenis pelayanan masyarakat, pendapatan, dan mendukung operator layanan masyarakat yang berkualitas. Untuk tujuan ini, akan diadakan dengar pendapat dari masyarakat, lembaga negara bersangkutan yang terdiri dari:

Pendapatan dari operator pelayanan masyarakat harus berasal dari sumbangan, iuran ke atau sumber lain yang tidak berhubungan dengan iklan atau operasi bisnis penyiaran.

Dalam mendukung kualitas pelayanan operator masyarakat, harus ada kontribusi untuk stasiun 'administrasi stasiun, bukan untuk program tertentu, dengan proporsi tidak lebih dari setengah dari operator' dari total pendapatan. Selain itu, harus memiliki evaluasi terhadap kualitas pelayanan dan efisiensi pengeluaran anggaran yang berasal dari kontribusi, dengan mempertimbangkan setiap distribusi iuran.

BAB IV

Penelitian Penyiaran dan Telekomunikasi

Dan Dana Pengembangan untuk Kepentingan Umum

Pasal 52. Harus ada dana yang ditetapkan dalam Kantor NBTC yang disebut " Penelitian Penyiaran, dan Telekomunikasi dan Dana Pengembangan untuk Kepentingan Umum" dengan tujuan sebagai berikut:

(1) Untuk membuka kepada masyarakat secara universal dalam mengakses layanan penyiaran suara, siaran televisi dan telekomunikasi, serta mempromosikan layanan masyarakat dan mendukung operator layanan masyarakat sesuai pasal 51.

(2) Untuk mempromosikan dan mendukung pembangunan sumber komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam penyiaran dan sektor telekomunikasi, serta untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menjaga kecepatan dengan teknologi media dalam aspek pemanfaatan spektrum, teknologi informasi, fasilitas untuk penyandang cacat, orang tua, atau kurang mampu serta industri telekomunikasi dan industri terkait;

(3) Untuk mempromosikan dan mendukung pengembangan sumber daya manusia dalam penyiaran dan sektor telekomunikasi, teknologi informasi, serta untuk pelaksanaan organisasi yang bertanggung jawab untuk menetapkan standar etika dari pekerjaan atau profesi di bawah undang-undang tentang penyiaran dan operasi bisnis televisi;

(4) Untuk mendukung, mempromosikan dan melindungi konsumen layanan penyiaran, televisi dan pelayanan telekomunikasi;

(5) Untuk mendukung pelaksanaan sesuai UU Dana Pengembangan Media yang Aman dan Kreatif dengan mengalokasikan sejumlah uang untuk Dana Pengembangan Media yang Aman dan Kreatif.

Pasal 53. Dana yang sesuai Pasal 52 terdiri dari:

(1) Dana awal yang dialokasikan oleh pemerintah;

(2) Uang dari lelang spektrum sesuai Pasal 41 ayat enam;

(3) Uang yang telah dialokasikan dalam Pasal 65 ayat dua;

(4) Uang yang disetorkan ke Dana dibawah Undang-Undang Bisnis Penyiaran dan UU Bisnis Telekomunikasi;

(5) Denda administrasi yang dikenakan pada pelanggar berdasarkan Undang-Undang ini dan Undang-Undang Bisnis Penyiaran dan UU Bisnis Telekomunikasi;

(6) Uang atau properti yang disumbangkan ke Dana;

(7) Uang atau harta yang telah dialihkan sesuai Pasal 91;

(8) Bunga bank dan pendapatan dari Dana, termasuk pendapatan dari penelitian dan pengembangan di bidang layanan penyiaran dan telekomunikasi;

(9) Uang dan harta lainnya yang ditransfer ke Dana.

Dana di bawah ayat (4) dan (7) harus semata-mata digunakan untuk melayani berdasarkan tujuan sesuai Pasal 52 (1).

Dana di bawah ayat (4) yang dialokasikan oleh bisnis tertentu dan akan digunakan dalam mendukung bisnis, kecuali dari bisnis penyiaran dan televisi yang akan digunakan baik untuk bisnis penyiaran atau televisi.

Pasal 54. Harus ada Panitia Pengelolaan Dana yang terdiri dari

(1) Ketua NBTC sebagai ketua;

(2) Sekretaris Tetap Kantor Perdana Menteri, Sekretaris Jenderal Kantor Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional, Direktur Jenderal 'Departemen Pengawas Keuangan, dan Direktur Elektronik Nasional dan Pusat Teknologi Komputer sebagai anggota;

(3) Seorang ahli yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan sumber daya manusia dan profesi media di bidang penyiaran suara, dan yang lain di televisi yang dipilih oleh anggota sesuai ayat (1) dan (2);

(4) Seorang ahli yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam layanan telekomunikasi berbasis universal atau di daerah pedesaan, termasuk layanan telekomunikasi bagi yang kurang mampu yang dipilih oleh anggota sesuai ayat (1) dan (2);

(5) Seorang ahli yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam perlindungan hak konsumen atau hak-hak rakyat dan mempromosikan kebebasan yang dipilih oleh anggota sesuai ayat (1) dan (2);

(6) Seorang ahli yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam promosi dan perlindungan hak-hak penyandang cacat dan kurang mampu yang dipilih oleh anggota sesuai ayat (1) dan (2).

Sekretaris Jenderal NBTC akan menjadi anggota dan sekretaris dan menunjuk pejabat yang berwenang dari Kantor NBTC sebagai asisten sekretaris.

Anggota berdasarkan ayat satu (3) (4) (5) dan (6) tidak sedang dalam masa larangan menurut Pasal 7 B. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) dan (11). Para anggota akan menjabat untuk masa jabatan tiga tahun dan dapat diangkat kembali tapi tidak boleh bekerja selama lebih dari dua periode berturut-turut.

Ketentuan Pasal 23 berlaku mutatis mutandis untuk pertemuan dari panitia pengelolaan dana.

Pasal 55. Panitia pengelolaan dana mempunyai tugas dan wewenang dalam pengelolaan dana dan memberikan rekomendasi tentang alokasi dana untuk tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 52 untuk mendapatkan persetujuan dari NBTC. Dalam kasus di mana pendapat NBTC berbeda dari panitia pengelolaan dana, NBTC harus memberikan alasan untuk pertimbangan lebih lanjut.

Panitia pengelolaan dana akan mengungkapkan rincian alokasi dana dan kinerja berdasarkan ayat satu ke publik melalui media elektronik dari Kantor NBTC dengan memberikan informasi tentang entitas permintaan dan penerima termasuk jumlah total dana yang dialokasikan.

Pemeliharaan, pengeluaran, laporan keuangan dan sistem akuntansi harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Panitia pengelolaan dana.

BAB V

Kantor Komisi Penyiaran Nasional dan Telekomunikasi

Pasal 56. Harus ada Kantor Komisi Penyiaran Nasional dan Telekomunikasi, yang disebut "Kantor NBTC" yang adalah badan hukum yang memiliki status lembaga Negara dan tidak berada dibawah lembaga pemerintah sesuai undang-undang tentang administrasi masyarakat, atau perusahaan negara di bawah undang-undang tentang prosedur anggaran atau hukum lain dan berada di bawah pengawasan seorang ketua.

Urusan Kantor NBTC tidak tunduk pada undang-undang tentang perlindungan tenaga kerja, undang-undang tentang hubungan kerja, undang-undang tentang jaminan sosial dan undang-undang tentang kompensasi pekerja.

Pasal 57. Kantor NBTC harus memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- (1) Bertanggung jawab untuk Kantor pendapatan dan pengeluaran NBTC;
- (2) Menyiapkan anggaran tahunan kantor NBTC dan menyerahkan kepada NBTC untuk disahkan. Anggaran tahunan tersebut harus mencakup anggaran yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas resmi dari NBTC, BC, TC dan Kantor NBTC;
- (3) Memantau dan menindaklanjuti pemanfaatan spektrum;
- (4) Menerima dan mempertimbangkan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan spektrum, operasi penyiaran dan bisnis telekomunikasi untuk menguji dan menyelesaikan masalah atau mengusulkan rekomendasi kepada NBTC untuk dipertimbangkan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh NBTC;
- (5) Studi, mengkompilasi dan menganalisa informasi yang berkaitan dengan spektrum, penggunaan spektrum, operasi penyiaran dan bisnis telekomunikasi;
- (6) Bertanggung jawab untuk pekerjaan administrasi NBTC, BC, TC dan Panitia Pengelolaan Dana.
- (7) Melakukan tindakan-tindakan lain yang dipercayakan oleh NBTC, BC, dan TC.

Pasal 58. NBTC harus memiliki wewenangan untuk mengeluarkan peraturan atau pemberitahuan yang terkait dengan administrasi umum, administrasi kepegawaian, anggaran, keuangan dan properti dan usaha lainnya dari Kantor NBTC, termasuk hal berikut:

- (1) Pembagian kerja dalam Kantor NBTC dan lingkup pekerjaan;
- (2) Pengaturan posisi, skala gaji dan pembiayaan lainnya dari Sekretaris Jenderal NBTC, pejabat dan karyawan dari Kantor NBTC, serta pembiayaan dan pengeluaran dari anggota lain dan anggota sub-panitia di bawah UU ini;
- (3) Memilih atau memilih kompetensi dari staf untuk kepentingan rekrutmen dan pengangkatan atau peningkatan skala gaji, kriteria untuk perpanjangan kontrak kerja dan berkewenangan dalam pemutusan hubungan kerja karena evaluasi kinerja gagal;
- (4) Pengelolaan personalia termasuk tindakan disipliner, permohonan dan keluhan;

- (5) Bertindak untuk dan bertindak sebagai orang yang pengelola kantor;
- (6) Pengaturan dari segi seragam dan berpakaian petugas dan karyawan Kantor NBTC;
- (7) Pekerjaan dan pengangkatan seseorang sebagai ahli atau spesialis yang bermanfaat bagi pelaksanaan tugas dari NBTC serta tingkat remunerasi;
- (8) Administrasi dan pengelolaan anggaran, properti dan persediaan dari Kantor NBTC;
- (9) Pemberian kesejahteraan atau bantuan lainnya.

Peraturan atau pemberitahuan berdasarkan ayat satu harus ditandatangani oleh Ketua dan mulai berlaku pada tanggal publikasi dalam Berita Negara.

Pasal 59. Kantor NBTC harus menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan NBTC dan Kantor NBTC kepada publik melalui sistem jaringan informasi atau cara lain yang dianggap perlu dan setidaknya harus menyampaikan informasi berikut:

- (1) Setiap surat izin pemegang izin termasuk persyaratan yang ditentukan;
- (2) Ringkasan pendapatan bulanan dari Kantor NBTC sesuai Pasal 65;
- (3) Ringkasan pengeluaran bulanan dari NBTC dan Kantor NBTC;
- (4) Rincian pembayaran dari setiap anggota NBTC, BC, TC, sub-komite, dan penasihat;
- (5) Hasil penelitian dan pekerjaan lain yang dikontrakkan kepada lembaga luar;
- (6) Daftar keluhan, kemajuan dan hasil pertimbangan terhadap konsumen dan keluhan pemegang izin keluhan, dan jumlah hal tertunda;
- (7) Hasil pengadaan yang dilakukan oleh Kantor NBTC secara detail dan kontrak yang terkait.

Pasal 60. Kantor NBTC harus memiliki Sekretaris Jenderal NBTC yang bertanggung jawab atas kinerja Kantor dan langsung bertanggung jawab kepada Ketua dan akan menjadi atasan operatur dan karyawan dari Kantor.

Sekretaris Jenderal harus mewakili Office dalam urusan vis-à-vis dengan orang ketiga. Untuk tujuan ini, Sekretaris Jenderal dapat mendelegasikan perwakilan kepada orang lain untuk melakukan tindakan tertentu, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh NBTC dan diumumkan dalam Berita Negara. Peraturan tersebut tidak akan ditentukan dengan cara memaksa Sekretaris Jenderal mendelegasikan kekuasaannya kepada orang lain.

Pasal 61. Ketua, dengan persetujuan dari NBTC, akan menunjuk dan memberhatikan Sekretaris Jenderal NBTC. Sekretaris Jenderal yang berusia tidak kurang dari tiga puluh lima tahun sejak tanggal pengangkatan harus memiliki kualifikasi dan tidak berada di bawah larangan berdasarkan Pasal 7 termasuk kualifikasi lainnya sebagaimana ditentukan oleh NBTC.

Pasal 62. Sekretaris Jenderal memegang jabatan untuk masa jabatan lima tahun sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali tetapi tidak akan memegang jabatan selama lebih dari dua periode berturut-turut.

Pasal 63. Selain peletakan jabatan dengan penghentian istilah sesuai dengan Pasal 62, Sekretaris Jenderal meletakkan jabatan karena:

- (1) Meninggal dunia;
- (2) Usia mencapai enam puluh tahun;
- (3) Pengunduran diri;
- (4) Mengalami kebangkrutan;
- (5) Dipenjarakan oleh putusan akhir pengadilan dengan hukuman penjara;
- (6) Didiskualifikasi atau berada di bawah salah satu larangan sesuai pasal 61 ayat dua;
- (7) Dikeluarkan oleh penetapan anggota NBTC, dengan suara tidak kurang dari dua pertiga dari jumlah total Komisariss dengan alasan kesalahan pengelolaan, perilaku, ketidakmampuan untuk melakukan tugas-tugas;

Pasal 64. Sekretaris Jenderal dan penyabat dari Kantor NBTC dianggap sebagai pejabat negara sesuai Undang-Undang Organik Anti Korupsi.

Para pejabat dari Kantor NBTC harus memiliki kualifikasi dan tidak berada di bawah larangan di bawah peraturan yang ditetapkan oleh NBTC dan tidak akan menjadi anggota Direksi, pejabat eksekutif, penasihat, karyawan, pemegang saham atau mitra dalam suatu perusahaan atau kemitraan atau badan hukum lainnya yang melaksanakan penyiaran atau bisnis telekomunikasi.

Sekretaris Jenderal akan dianggap sebagai orang yang memegang posisi tinggi sesuai Undang-Undang Organik Anti Korupsi.

Dalam menjalankan tugas berdasarkan Undang-Undang ini, Sekretaris Jenderal dan pejabat yang berkompeten harus menjadi pejabat di bawah KUHP.

Pasal 65. Kantor pendapatan NBTC harus berasal dari berikut:

- (1) Biaya perizinan spektrum dan biaya izin usaha berdasarkan Pasal 42 ayat dua dan Pasal 45 ayat tiga;
- (2) Pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan tugas NBTC dan Kantor NBTC;
- (3) Pendapatan yang berasal dari Kantor properti NBTC ini;
- (4) Uang dan properti yang disumbangkan ke Kantor NBTC sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh NBTC untuk pekerjaan Kantor;
- (5) Subsidi dari pemerintah.

Pendapatan dari Kantor sesuai ayat (1) dan (2) dikurangi dengan pengeluaran untuk melakukan efisiensi Kantor, biaya beban yang diperlukan, dan uang yang dialokasikan untuk Dana sesuai pasal 52 dan Pengembangan Teknologi untuk Dana Pendidikan di bawah undang-undang tentang pendidikan nasional harus disetorkan ke kas negara.

Dalam kasus di mana pendapatan Kantor tidak cukup untuk melakukan efisien Kantor, termasuk biaya beban yang diperlukan, dan sumber-sumber lain yang tidak tersedia, pemerintah akan mengalokasikan anggaran nasional ke Kantor yang diperlukan.

Pasal 66. Untuk kepentingan alokasi anggaran nasional untuk Kantor NBTC bawah pasal 65 ayat tiga, Kantor wajib menyampaikan perkiraan anggaran tahunan kepada Dewan Menteri dalam rangka untuk memberikan subsidi kepada Kantor sesuai RUU appropriasi tahunan atau tambahan tagihan anggaran sebagai kasus. Dalam hal ini, Dewan Menteri dapat mengomentari Kantor disesuaikan anggaran dalam pengajuan untuk tagihan appropriasi tahunan atau tambahan tagihan anggaran. DPR atau Senat dapat meminta kehadiran Sekretaris Jenderal untuk memberikan informasi untuk pertimbangan '.

Pasal 67. Semua benda mati yang berada di kantor NBTC yang telah diakuasasi melalui pengadaan pertukaran dari pendapatan dari Kantor menurut Pasal 65 (1) (2) atau (3) atau sumbangan menurut (4) harus dimiliki oleh Kantor.

Properti negara di bawah tanah *Rachaphatsadu* bawah undang-undang tentang tanah *Rachaphatsadu* yang telah didiami oleh Kantor, Kantor berwenang dalam pengelolaan, merawat, memelihara, menggunakan dan mencari keuntungan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh NBTC.

Harta Kantor NBTC harus tidak bergerak.

Pasal 68. Rekening keuangan Kantor NBTC harus disiapkan sesuai dengan standar akuntansi internasional dibawah aturan Federasi Profesi Akuntansi dan akan ada audit internal pada keuangan, akuntansi dan inventarisasi Kantor NBTC sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh NBTC.

Dalam melakukan pemeriksaan internal sesuai ayat satu, akan ada Panitia Pemeriksaan Internal tidak kurang dari tiga orang anggota dan tidak lebih dari lima orang anggota yang ditunjuk oleh NBTC dari para ahli pemeriksaan internal yang memiliki kualifikasi dan tidak berada di bawah larangan menurut Pasal 7 dan pasal 8. Kantor harus menunjuk pejabat dengan jumlah yang tepat sebagai pemeriksa internal yang bertanggung jawab langsung kepada panitia pemeriksaan internal untuk membantu Panitia dalam menjalankan tugas.

Panitia Pemeriksaan Internal harus independen dalam melaksanakan tugas dan NBTC, Sekretaris Jenderal Kantor NBTC dan pejabat dari Kantor NBTC akan memfasilitasi kerja Panitia Pemeriksaan Internal dan auditor internal seperti yang diminta.

Panitia Pemeriksaan Internal harus menginformasikan NBTC hasil audit dalam waktu seratus delapan puluh hari.

Jangka waktu pengalihan, meletakan jabatan dan pertemuan Panitia Pemeriksaan Internal harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh NBTC.

Pasal 69. Kantor NBTC akan mempersiapkan laporan keuangan dan buku rekening dan menyerahkan kepada auditor dalam waktu enam puluh hari pada tahun berakhirnya fiskal.

Setiap tahun, Pejabat Auditor Jenderal akan menjadi auditor dan memeriksa pengeluaran uang dan harta dari Kantor NBTC. Dalam laporan pemeriksaan, itu harus memuat analisis efektivitas belanja anggaran dan memberikan pernyataan, apakah ada atau tidak pengeluaran yang sesuai dengan tujuan dan tingkat prestasi sesuai dengan target. Laporan auditor kemudian akan disampaikan ke NBTC, Kabinet dan Majelis Nasional.

Kantor NBTC adalah Pemeriksa keuangan unit yang dipemeriksa di bawah Undang-Undang Organik.

BAB VI

Tindak Lanjut, Inspeksi dan Evaluasi Kinerja dan Pengelolaan

Pasal 70. Harus ada Follow-up Kinerja dan Panitia Evaluasi Kinerja terdiri dari seorang ketua dan empat anggota lainnya yang memiliki catatan kerja yang jelas atau pengetahuan dan keahlian atau pengalaman sebagai berikut:

- (1) Seorang ahli dalam layanan penyiaran suara, dan yang lain di layanan siaran televisi;
- (2) Seorang ahli dalam layanan telekomunikasi;
- (3) Seorang ahli dalam perlindungan konsumen;
- (4) Salah satu ahli dalam hak asasi manusia dan promosi kebebasan.

Ketua Senat harus mengatur pemilihan orang yang cocok untuk diangkat sebagai panitia dengan jumlah ganda dari anggota sesuai dengan ayat satu sebelum mengirimkan daftar ke Senat untuk dipertimbangkan sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh Ketua Senat.

Orang-orang yang terpilih sebagai panitia akan mengadakan pertemuan dan memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi ketua.

Pasal 71. Follow-up Kinerja dan Panitia Evaluasi akan menduduki jabatan selama tiga tahun, tetapi tidak boleh diangkat untuk memegang jabatan selama dua periode berturut-turut.

Panitia berdasarkan ayat satu tidak boleh menjadi anggota dari NBTC, BC, TC, sub-komite, Sekretaris Jenderal NBTC, pejabat atau staf dari Kantor NBTC. Ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 20

(1) (3) (4) dan (5) akan diberlakukan mutatis mutandis.

Dalam kasus di mana Follow-up Kinerja dan Panitia Evaluasi meletakkan jabatan karena alasan apapun selain selain dari akhir masa jabatan, anggota yang tersisa dapat terus melaksanakan tugas dan dianggap bahwa Follow-up Kinerja dan Panitia Evaluasi terdiri dari anggota yang ada tetapi tidak kurang dari tiga orang.

Pelaksanaan pertemuan dan membuat ketetapan harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Follow-up Kinerja dan Panitia Evaluasi.

Pemberian umpah dan tunjangan lainnya dalam memilih dan melakukan tugas Follow-up Kinerja dan Panitia Evaluasi harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh NBTC.

Pasal 72. Follow-up Kinerja dan Panitia Evaluasi mempunyai tugas dan wewenang dalam pemantauan, audit dan evaluasi kinerja dan administrasi NBTC, BC, TC, Kantor NBTC dan Sekretaris Jenderal NBTC dan melaporkan kepada NBTC dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pada setiap tahun akuntansi. NBTC harus menyampaikan laporan bersama-sama dengan laporan kinerja tahunan NBTC sesuai Pasal 76 kepada Majelis Nasional. Laporan tersebut harus diinformasikan kepada masyarakat melalui sistem jaringan informasi dari Kantor NBTC atau cara lain yang sesuai.

Evaluasi menurut ayat satu harus berdasarkan fakta-fakta dan informasi dan hasil dengar pendapat dengan pemegang faham.

Panitia dapat menugaskan badan khusus lainnya atau badan untuk melakukan tugas-tugas pengumpulan dan analisa informasi dan evaluasi untuk tujuan penyusunan laporan.

Pasal 73. Laporan di bawah pasal 72 paling tidak harus mengandung isi sebagai berikut:

- (1) Kinerja NBTC, BC, TC, Kantor NBTC dan Sekretaris Jenderal NBTC;
- (2) Fakta-fakta atau observasi berkenaan dengan pelaksanaan tugas dari NBTC yang efisiensi dan kepatuhan dengan kebijakan pemerintah serta pendapat dan rekomendasi.
- (3) Komentar pada laporan tahunan NBTC sesuai pasal 76;
- (4) Hal-hal lain yang dianggap sesuai untuk pengakuan dari NBTC, Majelis Nasional atau masyarakat.

NBTC, BC, TC, Kantor NBTC dan Sekretaris Jenderal NBTC akan bekerjasama dan memberikan fasilitasi seperti yang diminta oleh Follow-up Kinerja dan Panitia Evaluasi.

BAB VII

Hubungan dengan Pemerintah dan Majelis Nasional

Pasal 74. Dalam menjalankan tugasnya, NBTC harus memperhatikan dan bertindak sesuai dengan kebijakan bahwa Kabinet dinyatakan sebagai Majelis Nasional.

Pasal 75. Dalam kasus di mana ada negosiasi atau kesimpulan dari perjanjian antara Pemerintah Kerajaan Thailand dan pemerintah negara-negara asing atau organisasi internasional dalam kaitannya dengan pengelolaan spektrum, penyiaran suara, siaran televisi, dan layanan telekomunikasi, atau usaha terkait lainnya, NBTC dan Kantor NBTC mempunyai tugas untuk memberikan informasi dan ikut berpartisipasi sebagaimana diberitahu oleh pemerintah.

Pasal 76. NBTC akan menyiapkan laporan kinerja tahunan pada pengelolaan spektrum, penyiaran suara, siaran televisi, dan layanan telekomunikasi sebagai kasus yang akan menunjukkan rincian dari rencana kerja dan hasil, manajemen spektrum, penetapan frekuensi, bisnis penyiaran suara, bisnis televisi penyiaran dan operasi bisnis telekomunikasi sebagai kasus yang bisa terjadi, dan rencana masa depan, dan menyerahkan kepada Kabinet dan Majelis Nasional dalam seratus dua puluh hari terhitung sejak tanggal berakhirnya setiap tahun akuntansi. Laporan ini juga harus disampaikan kepada masyarakat.

Laporan kinerja tahunan di bawah ayat satu paling sedikit memuat sebagai berikut:

- (1) Hasil kinerja NBTC pada tahun lalu dibandingkan dengan pengaturan rencana pekerjaan atau proyek;
- (2) Rencana Kerja, proyek dan rencana anggaran untuk tahun yang akan datang;
- (3) Laporan keuangan dan laporan auditor, laporan audit internal;
- (4) Masalah dan hambatan dalam usaha penyiaransuara dan siaran televisi, dan pelayanan telekomunikasi yang signifikan kepada masyarakat;
- (5) Kualitas dan tarif biaya pelayanan dari berbagai jenis telekomunikasi yang signifikan kepada publik;
- (6) Efisiensi dan efektivitas dalam penanganan keluhan konsumen;
- (7) Efisiensi dan efektivitas Dana berdasarkan Pasal 52;

(8) Laporan Persaingan dalam penyiaran suara dan televisi, dan pasar telekomunikasi, termasuk pengamatan mengenai perilaku dengan cara penguasaan pasar baik secara langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan dampak pada orang-orang dan kepentingan umum.

Perdana Menteri, DPR dan Senat dapat meminta NBTC atau Sekretaris Jenderal NBTC untuk menjelaskan salah satu pelaksanaan secara tertulis atau pernyataan secara lisan.

BAB VIII

Hukuman(Peneliti)

Pasal 77. Untuk setiap operator bisnis penyiaran atau telekomunikasi yang gagal dalam mematuhi perintah sesuai Pasal 31 ayat dua, NBTC mempunyai wewenang untuk menjatuhkan denda administrasi yang tidak melebihi dari lima juta Baht dan denda yang tidak melebihi seratus ribu Baht perhari ketika semua perintah belum ditaati.

Pasal 78. Siapa saja yang menggunakan frekuensi untuk penyiaran radio dan televisi atau bisnis telekomunikasi tanpa memperoleh izin berdasarkan pasal 41 ayat satu atau Pasal 45 ayat satu dikenakan hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 66 dari Undang-undang Bisnis Penyiaran B.E. 2551 (2008) atau Pasal 67 dari Undang-undang bisnis telekomunikasi B.E. 2544 (2001) jika terjadi kasus tersebut.

Pasal 79. Setiap pejabat NBTC atau orang yang berwenang dalam NBTC yang menyadari atau telah diberitahu tentang kesalahan penggunaan frekuensi atau melanggar, atau tidak sesuai dengan, UU ini, dan jika pejabat tersebut gagal untuk menegakkan undang-undang dan jika bertindak atau menahan diri dari tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 157 KUHP, kompeten resmi atau orang yang melaksanakan wewenang NBTC tersebut akan dikenakan penjara untuk jangka waktu tidak melebihi tiga tahun atau denda tidak melebihi enam puluh ribu Baht atau kedua-duanya.

Ketentuan Peralihan

Pasal 80. Selama tidak adanya NBTC di bawah Undang-Undang ini, Komisi Telekomunikasi Nasional yang didirikan dibawah Undang-undang Organisasi untuk Menetapkan Frekuensi Radio dan Pengaturan Pelayanan dan Penyiaran Telekomunikasi. 2543 (2000) akan terus melaksanakan tugas sebagai NBTC dibawah Undang-Undang ini kecuali untuk bisnis penyiaran di bawah Undang-Undang Bisnis Penyiaran yang harus sesuai dengan hukum tersebut.

Komisi Telekomunikasi Nasional berdasarkan ayat satu akan meletakkan jabatan pada saat penunjukan NBTC.

Pasal 81. Komisi dibawah Undang-undang Bisnis Penyiaran Telekomunikasi B.E. 2551 (2008), Komisi bawah Undang-undang Penyiaran Telekomunikasi B.E. 2544 (2001), dan Komisi Nasional Layanan Radio dan Televisi berdasarkan pasal 61 dari Undang-undang Penyiaran Publik Thailand B.E. 2551 (2008) artinya NBTC berada di bawah Undang-Undang ini.

Semua wewenang dan tugas para menteri, Direktur Jenderal Departemen Pos dan Telegraph, dan pejabat perizinan pemerintah di bawah Undang-Undang Komunikasi Radio akan menjadi wewenang dan tugas NBTC dibawah Undang-Undang ini.

Pasal 82. Ketika NBTC telah ditunjuk, departemen pemerintah, BUMN, lembaga negara atau orang yang memiliki frekuensi atau menggunakan frekuensi untuk operasi penyiaran suara, siaran televisi, dan bisnis telekomunikasi pada tanggal berlakunya UU ini mempunyai tugas untuk menginformasikan NBTC dengan rincian penggunaan frekuensi termasuk alasan memegang frekuensi sesuai dengan kriteria dan jangka waktu yang ditentukan oleh NBTC.

Dalam mematuhi ayat satu, departemen pemerintah, BUMN, dan lembaga negara harus memberitahu NBTC rincian dari izin, konsesi, atau kontrak, termasuk biaya durasi dan konsesi kontrak atau manfaat lainnya sesuai dengan izin yang bersangkutan, konsesi, atau kontrak sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh NBTC. NBTC akan memeriksa legalitas izin-izin tersebut, konsesi, atau kontrak, serta menyampaikan informasi dan hasil pemeriksaan ke masyarakat.

Pasal 83. Setiap orang yang memiliki atau menggunakan frekuensi untuk operasi yang sah penyiaran suara atau bisnis penyiaran televisi pada tanggal berlakunya Undang-undang ini dan sesuai dengan Pasal 82 harus dianggap diizinkan sesuai Undang-Undang ini. NBTC akan mengawasi frekuensi orang yang ditunjuk, atau pengguna frekuensi sesuai dengan Undang-Undang ini, undang-undang lain dan kriteria yang ditetapkan oleh NBTC sampai dengan berakhirnya tugas dalam ayat tiga.

Ketentuan Pasal 43 tidak berlaku untuk departemen pemerintah dan perusahaan negara yang memiliki frekuensi yang telah diberikan dengan cara otorisasi, konsesi atau kontrak untuk orang lain untuk operasi bisnis yang sah. Orang yang diberikan otorisasi, konsesi atau kontrak berhak untuk melanjutkan bisnis untuk periode yang tersisa terkait dengan otorisasi tersebut, konsesi atau kontrak sampai pemberhentian mereka.

NBTC harus menentukan durasi yang tepat untuk frekuensi orang yang ditunjuk, atau pengguna frekuensi untuk mengembalikan frekuensi untuk penugasan atau perbaikan sebagaimana ditentukan dalam Rencana Utama Pengelolaan Spektrum sesuai pasal 48 dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kebutuhan dari usaha dan pemanfaatan frekuensi. Alasan dan kebutuhan untuk memegang frekuensi seperti yang tercantum dalam Pasal 82 juga harus dipertimbangkan.

Pasal 84. Setiap orang yang memiliki frekuensi yang ditetapkan atau menggunakan frekuensi untuk bisnis telekomunikasi yang sah pada tanggal berlakunya Undang-undang ini dan sesuai dengan Pasal 82 harus dianggap diizinkan sesuai Undang-Undang ini. NBTC wajib mengawasi frekuensi orang yang ditunjuk atau pengguna frekuensi sesuai dengan Undang-Undang ini, undang-undang lain dan kriteria yang ditetapkan oleh NBTC sampai dengan berakhirnya tugas berdasarkan ayat empat.

Ketentuan Pasal 46 tidak berlaku untuk departemen pemerintah dan perusahaan negara yang memiliki frekuensi ditugaskan telah diberikan dengan cara otorisasi, konsesi atau kontrak untuk orang lain untuk operasi bisnis yang sah. Orang yang diberikan otorisasi, konsesi atau kontrak berhak untuk melanjutkan bisnis untuk periode yang tersisa terkait dengan otorisasi tersebut, konsesi atau kontrak sampai pemberhentian mereka.

Apabila UU ini berlaku sampai tiga tahun dan berakhir, pendapatan perusahaan-perusahaan negara, yang berasal dari usaha yang mempunyai izin, konsesi atau kontrak sesuai dengan ayat dua bahwa perusahaan negara dioperasikan sesuai undang-undang tentang partisipasi pribadi dalam usaha

Negara, usaha tersebut secara keseluruhan atau sebagian, harus dikurangi biaya berikut dan disetorkan ke NBTC yang akan mentransfer uang itu kepada kas negara.

(1) Biaya Perizinan Bisnis dihitung dari basis pendapatan yang dihasilkan dari otorisasi, konsesi atau kontrak;

(2) Biaya untuk mendukung ketentuan telekomunikasi yang berbasis universal dan pelayanan sosial sesuai dengan kebijakan pemerintah dan Pasal 50 dihitung dari basis pendapatan yang dihasilkan dari otorisasi, konsesi atau kontrak;

(3) Biaya yang dikeluarkan dari operasi yang berhubungan dengan otorisasi, konsesi atau kontrak seperti yang ditentukan oleh Departemen Keuangan.

NBTC harus menetapkan batas waktu untuk frekuensi orang yang ditunjuk atau pengguna frekuensi untuk mengembalikan frekuensi untuk penugasan atau perbaikan sebagaimana ditentukan dalam Pengelolaan Master Plan Spectrum sesuai Pasal 48. Untuk tujuan ini, penyediaan Pasal 83 ayat tiga berlaku mutatis mutandis.

Pasal 85. Pada awalnya, ketentuan Pasal 49 berkaitan dengan alokasi tidak kurang dari dua puluh persen dari frekuensi ke sektor sipil untuk tujuan layanan siaran televisi tidak berlaku dengan sistem transmisi digital yang ditetapkan oleh NBTC.

NBTC akan menyelesaikan perumusan Master Plan Pengelolaan Spektrum sesuai Pasal 48 dalam waktu satu tahun sejak tanggal NBTC ditetapkan. Rencana tersebut mengatakan akan menentukan jangka waktu sistem transmisi harus diubah ke sistem digital, dan jangka waktu untuk menetapkan frekuensi penyiaran televisi ke sektor sipil.

Setelah Master Plan Pengelolaan Spektrum telah berlaku, kecuali untuk sistem transmisi digital, NBTC mengalokasikan frekuensi sementara untuk sektor sipil untuk melakukan layanan televisi di daerah-daerah tertentu di mana frekuensi cukup tersedia.

Pasal 86. Pemegang izin bisnis telekomunikasi yang telah ditetapkan oleh Komisi Telekomunikasi Nasional untuk menyediakan telekomunikasi berbasis universal dan pelayanan sosial sesuai dengan Undang-undang Bisnis Telekomunikasi B.E. 2544 (2001) sebelum tanggal berlakunya Undang-undang ini harus dibebaskan dari kontribusi Dana sesuai pasal 50 sampai penghentian seperti

yang ditentukan dalam Pemberitahuan Komisi Telekomunikasi Nasional tentang Kriteria, Prosedur dan Persyaratan untuk Penyediaan Universal Telekomunikasi Dasar dan Pelayanan Sosial.

Pasal 87. Semua izin yang dikeluarkan berdasarkan dari Undang-undang Komunikasi Radio B.E. 2498 (1955), Organisasi yang Menetapkan Frekuensi Radio dan Mengatur Penyiaran dan Undang-undang Penyiaran Telekomunikasi B.E. 2543 (2000), Undang-undang Penyiaran Bisnis B.E. 2551 (2008) dan Undang-undang Telekomunikasi Bisnis B.E. 2544 (2001) sebelum tanggal berlakunya Undang-undang ini akan terus berlaku sampai berakhirnya jangka waktu dan dianggap sebagai perizinan yang dikeluarkan sesuai Undang-Undang ini. NBTC harus mengawasi izin sesuai dengan Undang-Undang ini, undang-undang terkait lainnya dan kriteria yang ditentukan oleh NBTC.

Perizinan berdasarkan ayat satu untuk memegang atau menggunakan frekuensi yang masa berlakunya tidak ditentukan boleh terus melanjutkan sampai tanggal penghentian sebagaimana akan ditentukan oleh NBTC. Untuk tujuan ini, penyediaan Pasal 83 ayat tiga berlaku mutatis mutandis.

Pasal 88. Dalam seratus dua puluh hari dari tanggal berlakunya Undang-Undang ini, NBTC menerbitkan perizinan spektrum dan izin usaha di bawah hukum pada bisnis penyiaran ke Pelayanan Penyiaran Masyarakat Thailand sesuai dengan sifat dan kategori operasi bisnis termasuk ruang lingkup yang ada layanan pada tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku.

Penggunaan frekuensi untuk usaha bisnis selain izin berdasarkan ayat satu harus sesuai dengan Rencana Utama Pengelolaan Frekuensi dan diberikan izin dari NBTC. Dalam hal ini, NBTC boleh mengatur kondisi apapun yang diperlukan untuk kepentingan umum.

Usaha dari Pelayanan Penyiaran Masyarakat Thailand akan berada di bawah ketentuan Undang-undang ini sepanjang tidak bertentangan atau tidak konsisten dengan hukum pada layanan penyiaran masyarakat Thailand.

Selama tidak adanya perizinan menurut ayat satu, Pelayanan Penyiaran Masyarakat Thailand akan dapat melanjutkan bisnis siarannya.

Pasal 89. Semua urusan, harta, hak, kewajiban, kewajiban, pejabat dan karyawan, dan anggaran dari Kantor Komisi Telekomunikasi Nasional akan ditransfer ke Kantor NBTC sesuai Undang-Undang ini.

Para pejabat dan karyawan yang dialihkan berdasarkan ayat satu akan menerima gaji, honorarium, atau upah, termasuk hak dan keuntungan pada tarif yang sama dengan hak yang ada sampai perekrutan dan penunjukan untuk Kantor NBTC dibawah Undang-Undang ini. Penetapan untuk menerima gaji atau upah lebih rendah dari tariff atas adanya terlarang.

Dalam kasus pejabat atau karyawan sesuai dengan peraturan atau kontrak di mana jadwal kerja tidak ditentukan, pekerjaan seperti itu tidak akan dianggap memiliki hak atau manfaat berdasarkan ayat dua.

Pasal 90. Pada tahap awal, penunjukan Sekretaris Jenderal NBTC harus diselesaikan dalam waktu sembilan puluh hari dari tanggal NBTC telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Selama tidak adanya Sekretaris Jenderal NBTC sesuai Undang-Undang ini, Sekretaris Jenderal Komisi Telekomunikasi Nasional di bawah Organisasi untuk Menetapkan Frekuensi Radio dan Mengatur Penyiaran dan Undang-undang Penyiaran Telekomunikasi B.E. 2543 (2000), yang memegang jabatan sebelum tanggal berlakunya UU ini, akan melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Jenderal NBTC.

Pasal 91. Semua uang dan harta benda Pengembangan Penyiaran Radio dan Televisi untuk Dana Manfaat Umum dan Pengembangan Telekomunikasi untuk Dana Manfaat Umum di bawah Organisasi untuk Menetapkan Frekuensi Radio dan Mengatur Penyiaran dan Undang-undang Penyiaran Telekomunikasi.E. 2543 (2000) yang tersisa pada tanggal berlakunya Undang-undang ini akan dialihkan ke Dana sesuai Undang-Undang ini.

Pasal 92. Semua urusan, harta, hak dan kewajiban dari Departemen Hubungan Masyarakat, Kantor Sekretaris Permanen dari Kantor Perdana Menteri yang menyangkut Divisi Komite Penyiaran Nasional Departemen Hubungan Masyarakat, Kantor Permanen Sekretaris Kantor Perdana Menteri yang tersisa pada tanggal berlakunya Undang-undang ini akan dipindahkan ke Kantor NBTC, kecuali untuk anggaran yang berkaitan dengan gaji dan upah personil yang akan ditransfer ke Departemen Hubungan Masyarakat, Kantor Sekretaris permanen dari Kantor Perdana Menteri.

Pasal 93. Pejabat Pemerintah dan karyawan Divisi Komite Penyiaran Nasional Departemen Hubungan Masyarakat, Kantor Sekretaris Permanen dari Kantor Perdana Menteri yang memegang jabatan sebelum tanggal berlakunya Undang-Undang ini yang ingin pindah untuk bekerja sebagai pejabat atau pegawai dari Kantor NBTC dan memberitahu Kepala mereka secara tertulis dalam waktu sembilan puluh

hari dari tanggal berlakunya UU ini, Kantor NBTC harus merekrut dan menunjuk bahwa pejabat atau pegawai pemerintah sebagai pejabat atau karyawan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh NBTC. Dalam hal ini, skala gaji dan upah tidak boleh lebih rendah dari skala diterima sebelumnya. Mereka yang belum mengajukan permohonan untuk transfer dalam waktu yang ditentukan tersebut akan kembali bekerja di Departemen Hubungan Masyarakat, Kantor Sekretaris Permanen dari Kantor Perdana Menteri.

Selama tidak adanya NBTC di bawah Undang-Undang ini, kewenangan NBTC pada ayat satu akan menjadi wewenang dari Komisi Telekomunikasi Nasional ditunjuk berdasarkan Organisasi untuk Menetapkan Frekuensi Radio dan Mengatur Penyiaran dan Undang-undang Penyiaran Telekomunikasi B.E. 2543 (2000).

Pasal 94. Rekrutmen dan pengangkatan pejabat pemerintah sesuai Pasal 93 dianggap sebagai rilis dari layanan karena pemutusan resmi atau pembubaran posisi di bawah undang-undang tentang pensiun pemerintah atau undang-undang tentang dana pensiun pemerintah.

Perekrutan dan pengangkatan karyawan di bawah Pasal 93 dianggap sebagai rilis dari layanan karena pembubaran resmi posisi atau penghentian normal kerja, bukan pada hitungan melakukan kesalahan, dan dengan demikian orang yang berhak menerima uang pesangon sesuai dengan peraturan dari Departemen Keuangan.

Pasal 95. Semua aturan, ketentuan, pemberitahuan atau perintah yang dikeluarkan berdasarkan Organisasi untuk Menetapkan Frekuensi Radio dan Mengatur Penyiaran dan Undang-undang Penyiaran Telekomunikasi B.E. 2543 (2000) yang tersisa berlaku pada tanggal berlakunya Undang-undang ini akan terus menjadi efektif sejauh mereka tidak bertentangan atau tidak konsisten dengan ketentuan Undang-Undang ini sampai aturan, peraturan, pemberitahuan atau perintah yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang ini mulai berlaku.

Ditandatangani oleh:

Abhisit Vejjajiva

Perdana Menteri

Catatan: Alasan untuk menyebarkan UU ini adalah sesuai dengan Pasal 47 dari Konstitusi Kerajaan Thailand menyatakan bahwa tidak akan menjadi independen Badan pengawas memiliki tugas untuk mengalokasikan frekuensi dan mengawasi penyiaran suara, siaran televisi dan layanan telekomunikasi seperti yang ditentukan oleh undang-undang, dan Pasal 305 (1) menyatakan bahwa hukum tersebut akan setidaknya, dalam substansinya, membuat ketentuan untuk pembentukan komisi tertentu sebagai badan internal dalam lembaga tersebut independen dari lembaga yang lain untuk bertanggung jawab mengawasi siaran radio dan televisi bisnis dan mengawasi bisnis telekomunikasi dan mengandung rincian yang berkaitan dengan pengawasan dan perlindungan dari operasi bisnis, penyediaan dana untuk pengembangan sumber daya komunikasi dan promosi partisipasi masyarakat dalam operasi media massa publik. Selain itu, Organisasi untuk Menetapkan Frekuensi Radio dan Mengatur Penyiaran dan Undang-undang Penyiaran Telekomunikasi B.E. 2543 (2000) telah berlaku untuk jangka waktu yang panjang yang cukup lama tetapi tidak seefektif yang seharusnya, dan dengan demikian, mengakibatkan sejumlah hambatan pelaksanaan. Juga ketentuan tidak sesuai dengan Konstitusi Kerajaan Thailand. Oleh karena itu, sudah bijaksana untuk mendirikan sebuah badan pengawas independen yang bertugas untuk mengalokasikan frekuensi dan mengawasi penyiaran suara, siaran televisi dan layanan telekomunikasi, termasuk untuk menentukan ruang lingkup mandat badan dan pengawasan usaha mengatakan, serta merevisi UU Organisasi untuk Menetapkan Frekuensi Radio dan mengatur Penyiaran dan Pelayanan Telekomunikasi harus sesuai dengan ketentuan Konstitusi Kerajaan Thailand. maka UU ini akan diberlakukan.

This translated version is prepared with the sole purpose of facilitating the comprehension of foreign participants in the telecommunication rules and regulations and shall not in any event or by any reason be construed or interpreted as having effect in substitution for supplementary to the Thai version thereof. If its translation to other languages is in contrary to Thai version, the latter shall prevail.

Please note that the translation has not been subjected to an official review by the Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission. The Office of NBTC, accordingly, shall not undertake any responsibility for its accuracy, nor be held liable for any loss or damages arising from or in connection with its use.

